

# MEMBACA KALURAHAN KEMADANG

DARI SEJARAH HINGGA KEMANDIRIAN DESA

*Sebuah Laporan yang disusun tentang Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Hasil Observasi Lapangan dan Focus Group Discussion sebagai output Field Study dalam Mata Kuliah "Kapita Selektā" oleh Mahasiswa Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025*



# SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"



**Disusun oleh:**  
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Mata Kuliah Kapita Selektta 2024/2025

**Editor:**  
Sri Widayanti  
Soetji Andari

**Pengantar:**  
Sutoro Eko



# KATA PENGANTAR

## Pergeseran Cerita Desa

*Sutoro Eko*

“*Desa mawa cara, desa mawa carita, negara mawa tata*”, demikianlah filosofi masyarakat Jawa, yang bermakna “desa memiliki cara tersendiri, memiliki cerita lokal yang unik, dan negara memiliki kuasa aturan. Bahkan seribu desa mengandung seribu cerita, untuk memperlihatkan bahwa desa adalah soal keragaman dan keunikan. Tetapi berkat tata negara dan pembangunan yang masuk ke dalam tubuh desa, keseragaman cerita desa lebih menonjol ketimbang keberagaman cerita desa. Cara-desa sudah digantikan dengan tata-negara.

Apa maknanya? Mengapa bisa begitu? Kaum esensialis berujar bahwa desa (termasuk adat dan negeri) adalah sebuah entitas (subjek, ruang, dan arena) lokalitas, hidup-kehidupan-penghidupan, dan representasi yang berbeda dengan negara. Lokalitas adalah soal identitas, rakyat pribumi alias *wong ndeso (folks)*, kearifan lokal, dan masyarakat setempat. Desa bukan tempat hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga negara, melainkan menjadi domain bagi masyarakat setempat. Dengan kalimat lain, desa bukan milik warga negara, melainkan milik masyarakat setempat. Hidup adalah konsep biologis, tetapi juga bermakna politik, bahwa desa sebagai entitas yang hidup ketika hadir menjadi sebuah “republik kecil” dengan memiliki kebajikan, otonomi dan demokrasi. Kehidupan adalah sosial relasi sosial-politik dalam bentuk pergaulan hidup bersama secara komunal-egaliter (*sak pada-pada*) dan direpresentasikan menjadi politik-pemerintahan dalam bentuk “pemerintahan bersama masyarakat” alias *self-governing community*. Penghidupan adalah konsep ekologi dan ekonomi dalam bentuk “hajatan hidup orang banyak” sebagai sumber kemakmuran bersama bagi masyarakat setempat. Pertemuan antara hidup, kehidupan, dan penghidupan yang dibungkus (representasi) dengan politik-pemerintahan, membuat desa sebagai arena ekonomi-politik bagi masyarakat setempat, yakni praktik menambah, mengalikan, mengurangi, dan membagi, dengan cara mereka sendiri, yang dalam bentang sejarah, pernah membentuk desa berdikari.


Tetapi bagi kaum modernis, desa adalah masa lalu, desa identik dengan kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan, yang membuat mereka melakukan imposisi terhadap desa dengan modernisasi dan pembangunan. Negara pembangunan telah menggunakan pembangunan sebagai mantra, kekuasaan, dan tujuan yang memasukkan (integrasi) desa ke dalam negara, dan negara dengan pembangunan (mantra, kekuasaan, tujuan) untuk masuk (penetrasi) ke dalam desa. Pembangunan desa memiliki tujuan membawa desa bisa lepas-landas, tumbuh

menjadi desa maju. Tetapi sejarah membuktikan bahwa negara pembangunan tidak pernah berhasil sepenuhnya memasukkan desa ke dalam tubuhnya, dan negara pembangunan juga tidak pernah berhasil masuk ke dalam tubuh desa, kecuali hanya menghisap secara ekonomi dan menindas secara politik. Desa tidak pernah berhasil mengalami kemajuan besar menuju lepas-landas, tetapi justru kandas di landasan.

Pertautan antara pembangunan dengan urbanisasi sebenarnya bukan untuk membentuk-memperkuat desa melainkan untuk membentuk-membesarkan kota sebagai pusat kekuasaan dan kekayaan kota. Desa tidak sempat mengepung kota, melainkan kota mengepung desa. Urbanisasi telah menciptakan pembusukan kota dan pemiskinan desa. Desa hanya memperoleh residu pembangunan. Orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota, akibat dari krisis penghidupan desa. Dengan kalimat lain, arena ekonomi-politik desa sudah dirampas oleh kekuasaan supra-desa. Politik-pemerintahan desa juga sudah hilang, digantikan dengan perkantoran desa dan kesibukan administrasi desa. Kepala desa tidak lagi menjalankan pemerintahan desa dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya menjalankan aturan tata-negara.

Modernisasi dan pembangunan, selain mengubah lanskap politik desa, juga telah mengubah imajinasi dan cerita orang tentang desa. Berkat imposisi dari Barat ini, imajinasi-cerita desa bergeser dari ekologi-ekonomi-politik menuju kata kunci dan indikator kemajuan pembangunan: pendidikan, administrasi, SDM, inklusi, inovasi, kewirausahaan, hingga digitalisasi. Kaum modernis pasti membenci kosakata “desa berdaulat”, melainkan sangat suka pada “smart village”. Imajinasi dan cerita desa kekinian umumnya menggunakan bungkus “smart village”. Namun, di balik itu, “smart village” adalah wacana kekuasaan yang digunakan oleh kaum modernis untuk memajukan dan memberdayakan sambil melemahkan dan terus menghukum (*punishing*) desa. *Kok* menghukum? Ketika proyek-proyek kemajuan kaum modernis tidak membuat desa menjadi maju, maka mereka selalu menyalahkan desa dengan sebutan bodoh, masalah, SDM rendah, suka mencuri, dan lain-lain. Ini adalah kekuasaan hukuman (*punishment power*) kolonialisme terhadap desa dan kaum pribumi yang terus diwariskan di zaman neoliberal sekarang.

Kalau sudah *abih tandeh* (meminjam terminologi Yando Zakaria), apakah masih ada yang tersisa? Masih ada. Ketika ekonomi-politik, ekologi-politik, dan politik pemerintahan sudah *ambyar*, maka yang masih tersisa dalam tubuh desa adalah sosial-budaya dan sosial-ekonomi. Kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi direpresentasikan secara romantis tetapi anti-politik dengan kosakata gotong-royong, guyub-rukun, adem-ayem, *mangan ora mangan kumpul yen kumpul mangan*, miskin tetapi bahagia, dan lain-lain. Ini adalah bentuk ekonomi moral yang memiliki pemerataan tanpa pertumbuhan alias miskin bersama, akibat dari hilangnya ekonomi-politik, ekologi-politik, dan politik pemerintahan dari tubuh desa.



Itu semua adalah narasi kontradiksi. Di balik tujuan pembangunan yang indah, desa adalah korban pembangunan yang terus dirawat, diawetkan, dihukum, tetapi juga dinikmati dengan semangat *narima ing pandum*. Mantra, kekuasaan, dan tujuan pembangunan juga tidak membuahkan kejayaan negara dan kesempurnaan warga negara. Dengan kalimat yang bertenaga, Presiden Prabowo Subianto belakangan ini berujar: 30 tahun neoliberalisme di Indonesia telah terbukti gagal membawa kemakmuran bagi rakyat. Tentu termasuk kegagalan pembangunan desa yang justru membuat desa menjadi korban. Di balik desa menjadi korban, negara memperoleh beban.

Lantas orang pasti bertanya, bagaimana solusinya? Orang bisa mulai dari belajar secara alamiah dan sesuai tradisi manusia: menggunakan mata untuk membaca dan menyaksikan, menggunakan telinga untuk mendengarkan secara seksama, menggunakan otak untuk berpikir serius, menggunakan hati untuk merasakan dan membentuk nilai yang sejati, menggunakan mulut untuk membicarakan, menggunakan kaki untuk laku dan melangkah, dan menggunakan tangan untuk melayani. Kaum modernis pasti tidak suka dengan tradisi-alamiah ini, sebaliknya lebih suka dengan inovasi-ilmiah untuk memajukan dan memberdayakan sambil memeralat, melemahkan, dan menghukum desa.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Historis:	
Cikal Bakal Kalurahan Kemadang.....	1
Pendidikan:	
Perubahan Cara Pandang Terhadap Urgensi Pendidikan Bagi Warga Kalurahan Kemadang.....	8
Perlindungan Sosial:	
Upaya Kalurahan Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak.....	16
Transformasi UMKM:	
Dinamika Terkini Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Kolaborasi dan Inovasi Komunitas.....	24
Revitalisasi Budaya:	
Penguatan Organisasi Budaya Kalurahan Kemadang.....	30
Kemandirian Finansial Kalurahan:	
Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	41
Penguatan Regulasi:	
Kemadang Menyusun Arah Dari Regulasi Menuju Masyarakat Sejahtera.....	47
Kesejahteraan Gotong-Royong:	
Kolaborasi Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir.....	54
Kesimpulan.....	67
Daftar Pustaka.....	v

# HISTORIS: CIKAL BAKAL KALURAHAN KEMADANG

Albertus, Karlina Setyawati, Anom Kusuma, M. Roman Feiruz

## Asal Usul Desa atau Kalurahan Kemadang



Gambar 1: interview mahasiswa tentang cikal bakal Kalurahan Kemadang

Secara umum, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Perubahan nomenklatur yang didasari oleh Maklumat Kasultanan Yogyakarta No. 5 Tahun 1948, yang mengatur perubahan struktur pemerintahan di Daerah istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan menetapkan nomenklatur kalurahan sebagai pengganti desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan memperkuat tradisi lokal di Yogyakarta dengan mengganti istilah "desa" yang umum digunakan di Indonesia dengan istilah "kalurahan" yang lebih spesifik untuk Daerah istimewa Yogyakarta. Melalui perubahan ini, kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan lokal, sesuai dengan prinsip keistimewaan.

Kemadang merupakan salah satu kalurahan yang berada di kecamatan Tanjungsari kabupaten Gunungkidul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Istilah nama "Kemadang" berasal dari kata "Kekadangan" yang berarti persaudaraan. Hal ini mencerminkan semangat kolektif dan gotong royong masyarakat setempat. Kalurahan

Kemadang secara administratif diakui melalui Rijktsblad Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 12 Tahun 1916 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1916 hari Rabu Pahing tanggal Kaping 14 tahun 1846 Jawa yang mengatur kabupaten Gunungkidul bagian dari Kasultanan Ngayogyakarta, terdiri dari 3 (tiga) distrik yaitu Wonosari, Paliyan dan Semanu. Didalam Rijktsblad tersebut nama Kemadangkulon dibawah distrik Wonosari onderdistrik Tepus nomor 49. Dengan dokumen tersebut menjadi dasar berdirinya Kalurahan Kemadang.

Tokoh awal pemerintahan Kalurahan Kemadang adalah Ponco Kariyo, yang menjabat sebagai lurah pertama pada periode 1916–1948. Beliau menjadi pemimpin desa saat Kemadang pertama kali ditetapkan secara administratif.

Berikut adalah daftar lurah di kalurahan Kemadang tahun 1916-2025;

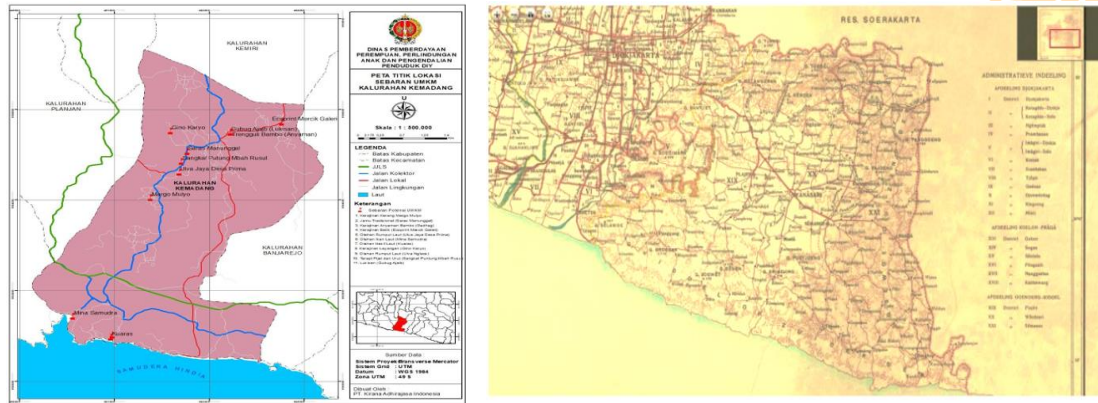
NO	NAMA	MASA JABATAN (TAHUN)
1	Ponco Kariyo	1916 - 1948
2	Kariyo Sentono	1948 - 1965
3	Radiyo Sumarno	1965 - 1984
4	Harjo Suwito	1984 - 1988
5	Pawiro Sentono	1988 - 1999
6	Ngatno	1999 - 2007
7	Sutono	2008 s/d sekarang

Pendirian dan penetapan Kalurahan Kemadang didorong oleh kebutuhan administratif masa kolonial, serta mobilitas masyarakat di kawasan pesisir selatan Gunungkidul yang membutuhkan pengaturan wilayah dan pemerintahan lokal yang lebih sistematis. Proses pendirian berlangsung formal melalui pengesahan rijktsblad, bukan melalui konflik. Namun, pengembangan wilayah berikutnya dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar pada awal abad ke-20.

### **Perkembangan Wilayah Kalurahan Kemadang**

Perkembangan wilayah adalah suatu proses perubahan dan peningkatan kualitas kehidupan di suatu area geografis tertentu. Ini melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Aspek-aspek yang tercakup dalam perkembangan wilayah meliputi ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan serta kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Tujuan utama dari perkembangan wilayah adalah menciptakan wilayah



Gambar 2:  
Kanan – Peta Kalurahan Kemadang saat ini,  
Kiri – Peta cikal bakal Kalurahan Kemadang

yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok. Saat ini perkembangan infrastruktur berkembang pesat sejak Kalurahan Kemadang menjadi Kalurahan Budaya. Jalan desa diperbaiki, akses ke objek wisata pantai ditingkatkan, dan sarana umum seperti balai kalurahan, sekolah, dan sanggar budaya telah dibangun.

Perkembangan batas wilayah di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan bagian dari penataan administrasi pemerintahan yang lebih luas di DIY. Bagi Kalurahan Kemadang, perkembangan batas wilayah ini memiliki pengaruh, atantara lain;

1. Memiliki identitas yang lebih kuat

Pengakuan resmi sebagai kalurahan dengan batas wilayah yang jelas memperkuat identitas dan otonomi lokal.

2. Akses sumber daya

Batas yang jelas mempermudah Kalurahan Kemadang dalam mengakses dan mengelola sumber daya, termasuk Dana Keistimewaan DIY, untuk pembangunan wilayahnya.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Mengingat Kalurahan Kemadang memiliki wilayah pesisir (seperti Pantai

Sepanjang), penegasan batas ini juga penting dalam pengelolaan kawasan tersebut, termasuk terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

#### 4. Dasar Perencanaan

Peta batas yang akurat menjadi dasar penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk pembangunan yang terarah.

Berikut ini adalah gambaran umum kalurahan Kemandang;

NO	IDENTITAS DESA DAN KELURAHAN	
1	Nama Kalurahan	Kemandang
2	Kode	3403172003
3	Tipologi	Desa Mandiri
4	Status DMD	Mandiri Budaya
5	Orbitasi wilayah ke kabupaten/kota	Kurang dari 1 jam
6	Kondisi wilayah	Diluar ibu kota kapanewon

NO	BATAS KALURAHAN	
1	Sebelah Utara	Kalurahan Kemiri
2	Sebelah Timur	Kalurahan Banjarejo
3	Sebelah Selatan	Sumudera Hindia
4	Sebelah Barat	Kalurahan Planjan

NO	WILAYAH	
1	Luas Wilayah	1.957,49 ha
2	Tanah Pekarangan	79,79 ha
3	Tanah Tegalan	1.549,18 ha
4	Tanah Kas Desa	150,59 ha
5	Tanah Lain-Lain	157,93 ha
6	Padukuhan	17 Padukuhan
7	Jumlah RW	17
8	Jumlah RT	58

NO	KONDISI GEOGRAFIS	
1	Ketinggian Dari Permukaan Laut	150.300 DPL
2	Banyaknya Curah Hujan	1.200 sampai 2.000 mm/Th
3	Suhu Uadara Rata-Rata	29 Derajat Celcius

NO	Orbitasi (Jarak Dari Pemerintahan)	
1	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kapanewon	3 KM
2	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	16 KM
3	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Provinsi	60 KM
4	Jarak Dari Pemerintahan Pusat	1.000 KM

Terkait perubahan sosial budaya, masyarakat di Kalurahan Kemadang tetap mempertahankan adat dan budaya seperti Sedekah Laut, Bersih Desa, Jamasan, dan Wayang Kulit. Namun, kini tradisi ini diperkuat dengan kebijakan seperti Surat Edaran Lurah dan dukungan APBKal untuk kegiatan budaya.

### **Hubungan Dengan Lingkungan Sekitar**

Sejak awal, Kalurahan Kemadang telah memiliki interaksi ekonomi dan sosial dengan desa-desa tetangga seperti Kemiri, Planjan, dan Banjarejo. Hal ini tampak dari kegiatan pasar desa, kerja sama musyawarah, dan sistem gotong royong antar padukuhan. Hubungan Kalurahan Kemadang dengan lingkungan sekitarnya cukup erat dan saling memengaruhi, baik secara sosial, ekonomi, maupun geografis.

#### 1. Hubungan Sosial

Kalurahan Kemadang memiliki hubungan sosial yang kuat dengan kalurahan tetangga seperti Banjarejo, Kemiri, dan Planjan. Adapun bentuk hubungan sosial tersebut antara lain yaitu kerja sama dalam kegiatan adat dan keagamaan, seperti kenduri desa, bersih dusun, dan sedekah laut, hubungan kekeluargaan antar warga yang sering kali memiliki kerabat lintas kalurahan dan kegiatan karang taruna antar-kalurahan yang mempererat hubungan antar generasi muda.

#### 2. Hubungan Ekonomi

Kalurahan Kemadang berperan sebagai wilayah dengan daya tarik wisata utama. Hal ini menimbulkan hubungan ekonomi yang saling mendukung, seperti penyediaan bahan baku dan tenaga kerja dari kalurahan sekitar untuk kebutuhan usaha wisata di Kemadang, distribusi hasil pertanian dan laut yang dijual di pasar lokal maupun di objek wisata, dan kerja sama antar-BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk pengelolaan kawasan wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### 3. Hubungan Geografis dan Lingkungan

Secara geografis, Kalurahan Kemadang berada di pesisir selatan dan memiliki

hubungan erat dalam pengelolaan lingkungan bersama wilayah sekitar. Hal ini tampak pada kerja sama pengelolaan kawasan pesisir, seperti dalam program konservasi pantai, mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan. Selain itu dapat kita lihat juga pada pemanfaatan sumber daya air dan tanah bersama dalam kegiatan pertanian tadah hujan atau konservasi lahan karst (wilayah yang terbentuk dari batuan kapur yang mudah larut oleh air, terutama air hujan yang sedikit asam).

#### 4. Kolaborasi Pemerintahan

Dalam lingkup pemerintahan, Kalurahan Kemadang sering berkoordinasi dengan kapanewon dan kalurahan sekitarnya untuk melakukan pengembangan infrastruktur antar-desa, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) dan kegiatan sosial dan kebencanaan

### **Sumber-Sumber Sejarah Kemadang**

Berikut adalah beberapa sumber sejarah utama yang berkaitan dengan Kalurahan Kemadang yaitu;

1. Rijksblad Tahun 1916
2. Dokumen Surat Keputusan Lurah
3. Cerita rakyat dan legenda local
4. Dokumentasi pemerintah desa
5. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pamong desa lama.

Mengenai kredibilitas dan keterbatasannya, dokumen resmi seperti Rijksblad sangat kredibel, sementara cerita rakyat meski kaya makna, rentan terhadap perubahan narasi karena diturunkan secara lisan. Banyak sumber belum terdokumentasi secara sistematis. Adapun yang menjadi kesulitan dalam mengakses informasi yaitu terdapat kesenjangan data terutama terkait sejarah sebelum tahun 1916. Dokumen dari masa kolonial sulit diakses karena berada di arsip kerajaan atau pusat dokumentasi lama yang belum terdigitalisasi.

## RIJKSBLAD VAN DJOGJAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1916

42

LAYANG KABAR NAGARA (REKSEBLAD)

Angka: 12. Gunung Kidul, paprentahan  
Pranatan anyar bab paprentahan distrik ing  
kabupaten Gunung Kidul. P  
Pranatane Papatih dalem katiti mangsan kaping  
17 Mei 1916.

Terang Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan ing  
Ngayogyakarta Hadiningrat Manira Pangera Harya Hadipati  
Danureja, Papatih dalem Sampeyan Ingkang Sinuhun Kanjeng  
Sultan ing Ngayogyakarta, sabiyantune kanjeng tuwan Resi  
den ing Ngayogyakarta, andhawuhake undhang-undhang kaya  
ing ngisor iki:

Bab 1

Kagungan dalem bumi kabupaten Gunung Kidul kabawahake by  
pati wadana distrik, krajana ana ing Wanasari.

Bab 2

Sakabehe kagungan dalem bumi bawah kabupaten Gunung Ki-  
dul pambagene paprentahan, kaya kang kasebut ing prate -  
lan aksara A. kang manira kanthekake layang undhang- un-  
dhang iki.

Bab 3

Miturut pambage paprentahan anyar kasebut ing duwur mau  
distrik Prangguk krajana kasuwak, lan bawahe dibawahake-  
marang distrik-distrik kang tepung wates.

Bab 4

Anane priyayi lan akehe belanja bawah Gunung Kidul kaya-  
ta: bupati, panji lan asisten panji saka reh-rehane, wus  
padha kasebut ing pratelan aksara B kang manira kanthekka  
ke undhang-undhang iki.

Bab 5

Tumapake layang undhang-undhang manira iki ing tanggal  
ping 1 Juni 1916.

## RIJKSBLAD VAN DJOGJAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1916

46

Kabupaten	Jenenge		Krajane distrik utama onderdis- trik	Bawah onderdistrik kaerah dening	Kalurahan kang dadi bawahe onderdistrik
	Distrik	Onderdistrik			
Gunung Kidul	Wanasari	Tepus	Tepus	Assisten panji	39 Winsunon
	!	!	!	!	40 Dangala
	!	!	!	!	41 Blengkonang
	!	!	!	!	42 Tepus
	!	!	!	!	43 Pule Ireng
	!	!	!	!	44 Bentahos
	!	!	!	!	45 Dlake
	!	!	!	!	46 Gatak
	!	!	!	!	47 Padangan
	!	!	!	!	48 Keruk
Gunung Kidul	Wanasari	Nglipar	Nglipar	Assisten Panji	49 Kemadeng Kulon
	!	!	!	!	50 Nglipar
	!	!	!	!	51 Sigerung
	!	!	!	!	52 Katongan
	!	!	!	!	53 Natab
	!	!	!	!	54 Kedungpoh
	!	!	!	!	55 Gedangan
	!	!	!	!	56 Mutelu
	!	!	!	!	57 Ngalang
	!	!	!	!	58 Pengkol
Gunung Kidul	Semanu	Semanu	Semanu	Panji	59 Kedung Keris
	!	!	!	!	60 Tegalarjo
	!	!	!	!	167 Watugajah
	!	!	!	!	60 Semanu
	!	!	!	!	61 Muggi
	!	!	!	!	62 Kangkung
	!	!	!	!	63 Iragun
	!	!	!	!	64 Panggul
	!	!	!	!	65 Cuwela
	!	!	!	!	66 Klepu
!	!	!	!	67 Pakwungu	
!	!	!	!	68 Gesing	
!	!	!	!	69 Gupakan	
!	!	!	!	70 Ngenep	

# PENDIDIKAN: URGENSI PENDIDIKAN BAGI WARGA KALURAHAN KEMADANG

Ulfah Hidayati, Gunawan Wibisono, Agustinus Holo,  
Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk di wilayah pedesaan. Namun, di banyak desa di Indonesia, pendidikan seringkali belum dianggap sebagai prioritas utama. Secara tradisional, masyarakat desa cenderung memandang bahwa bekerja di sektor pertanian atau berdagang lebih penting daripada menempuh pendidikan formal (Faiz & Kurniawaty, 2020). Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana anak-anak diharapkan untuk segera membantu orang tua dalam mencari nafkah, sehingga sekolah seringkali dinomorduakan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, seperti jarak sekolah yang jauh, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, dan minimnya sarana pembelajaran, turut memperparah rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan cara pandang yang signifikan di kalangan warga desa, di mana pendidikan mulai dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mampu membuka peluang hidup lebih baik. (Sihaloho et al., 2023).

Perubahan persepsi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah peran pemerintah dalam mempromosikan pentingnya pendidikan melalui berbagai program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program-program ini telah membantu meringankan beban finansial keluarga, sehingga lebih banyak anak yang dapat mengakses Pendidikan (Kemendikbudristek, 2021).



Gambar 3: interview mahasiswa tentang pendidikan di Kalurahan Kemadang

Faktor lain yang turut mendorong perubahan cara pandang adalah kemajuan teknologi dan globalisasi. Dengan semakin mudahnya akses internet, warga desa mulai terpapar informasi tentang peluang kerja yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan formal. Banyak pemuda di desa yang kini memanfaatkan platform online untuk belajar dan mengembangkan diri, menyadari bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah formal tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan digital (Rahman, 2023).

Hal ini mendorong mereka untuk lebih serius mengejar pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Selain itu, kesuksesan beberapa individu yang berhasil meraih kehidupan lebih baik melalui pendidikan juga menjadi inspirasi bagi warga desa. Anak-anak yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak atau menjadi pengusaha sukses menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat mengubah nasib. Kisah-kisah sukses ini sering dibagikan dalam pertemuan warga atau melalui media sosial, sehingga semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan pentingnya pendidikan (Sihaloho et al., 2023).

Dalam hal ini, salah satu desa yang mengalami perubahan cara pandang terhadap urgensi pendidikan adalah Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Dimana melalui proses wawancara bersama salah satu pamong Kalurahan Kemadang yaitu Bapak Sutrisno dimana beliau merupakan Danarto (Bendahara) Kalurahan Kemadang menyampaikan pandangannya terkait perubahan cara pandang warga Kemadang terhadap urgensi pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 ini membahas 4 sub tema yaitu Persepsi masyarakat Kemadang tentang pendidikan di masa lalu, perubahan persepsi pendidikan di masa kini, faktor pendukung dan penghambat pendidikan di Desa Kemadang, dan dampak perubahan persepsi terhadap kehidupan masyarakat Kemadang.

### **Persepsi Masyarakat Kemadang Tentang Pendidikan Di Masa Lalu**

Pada 10-20 tahun yang lalu, pendidikan di Desa Kemadang dipandang sebagai hal yang tidak prioritas. Beberapa karakteristik persepsi ini meliputi orientasi praktis-ekonomis dimana pendidikan dianggap kurang bermanfaat dibandingkan bekerja

langsung (melaut, bertani). Keterbatasan pemahaman dimana masyarakat Kemadang melihat sekolah hanya sebagai tempat untuk menghafal, menulis, dan ujian, tanpa memahami dampak jangka panjangnya. Kurangnya kesadaran SDM dimana sebelum tahun 1996, sangat sedikit orang yang percaya bahwa sekolah bisa mengubah nasib.

Ada beberapa faktor yang membentuk persepsi negatif tentang pendidikan di kalangan warga Kalurahan Kemadang seperti kondisi ekonomi yang sulit dimana keluarga lebih membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak-anak diajak membantu orang tua ke laut atau kebun karena dianggap lebih produktif. Faktor berikutnya yaitu ketersediaan sumber daya alam melimpah dimana hasil laut seperti ikan dan udang berlimpah, sehingga masyarakat merasa tidak perlu bergantung pada pendidikan untuk hidup. Faktor akses pendidikan yang terbatas dimana sekolah yang jaraknya jauh, fasilitas minim, dan kurangnya transportasi mempersulit anak-anak Kalurahan Kemadang untuk bersekolah. Faktor yang terakhir adalah budaya dan tradisi, pandangan ini terbentuk dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang saling berkaitan, dimana pola pikir warga Kemadang yang turun-temurun bahwa "*yang penting bisa cari uang*" sehingga menjadikan urgensi pentingnya mengenyam pendidikan di masyarakat menjadi terabaikan. Dengan pola pikir seperti ini, tidak mengherankan bahwa di tahun 1996 ke bawah banyak sekali Masyarakat Kemadang yang tidak menempuh jenjang Pendidikan formal bahkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Berikut ini Peneliti sajikan tabel Data Pendidikan di Kalurahan Kemadang.

No.	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak sekolah	2236	1031	1205
2.	Tidak lulus SD	643	332	311
3.	Lulus SD	2347	1160	1187
4.	Lulus SLTP	1443	778	665
5.	Lulus SLTA	692	389	303
6.	DIPLOMA I/II	28	9	19
7.	DIPLOMA III	46	25	21
8.	STRATA I	62	27	35
9.	STRATA II	1	1	0
10.	STRATA III	1	1	0
	<b>Total</b>	7499	3753	3746

Jika melihat dari tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa :

a. Dominasi Penduduk Berpendidikan Rendah

Jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tercatat sebanyak 2.236 jiwa atau sekitar 29,8% dari total penduduk. Selain itu, terdapat 643 jiwa (8,6%) yang tidak lulus SD, sehingga jika digabungkan, terdapat 2.879 jiwa atau sekitar 38,4% penduduk yang berada dalam kategori berpendidikan sangat rendah. Angka ini mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan pendidikan dasar di Kalurahan Kemadang. Tingginya angka ini di Kalurahan Kemadang disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: Kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak untuk bekerja sejak dini dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

b. Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Mendominasi

Kelompok penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2.347 jiwa, sedangkan yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1.443 jiwa. Secara total, kelompok ini berjumlah 3.790 jiwa, atau sekitar 50,5% dari total populasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Kemadang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama. Akan tetapi, angka ini belum cukup untuk mendorong transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, mengingat kebutuhan dunia kerja saat ini lebih mengutamakan lulusan menengah atas dan perguruan tinggi.

c. Pendidikan Menengah Atas dan Tinggi Masih Rendah

Jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) tercatat sebanyak 692 jiwa, dan yang melanjutkan hingga jenjang pendidikan tinggi (D1-S3) hanya 138 jiwa dengan rincian Diploma I/II: 28 jiwa; Diploma III: 46 jiwa; Strata I (S1): 62 jiwa; Strata II (S2): 1 jiwa; Strata III (S3): 1 jiwa. Jika ditotal, masyarakat Kemadang yang lulus pendidikan menengah atas hanya mencakup 830 jiwa, atau sekitar 11% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan masih rendahnya capaian pendidikan tinggi di kalangan masyarakat Kemadang, yang bisa berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal serta lambatnya pergerakan ekonomi berbasis pengetahuan.

#### d. Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Data juga memperlihatkan adanya ketimpangan gender dalam pencapaian pendidikan. Misalnya pada kelompok tidak sekolah, jumlah perempuan (1.205) lebih banyak daripada laki-laki (1.031). Sebaliknya yang terjadi pada kelompok pendidikan dasar dan menengah pertama, jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi, mengindikasikan adanya kemungkinan perempuan lebih banyak terhambat menyelesaikan pendidikan di usia sekolah dasar. Di tingkat perguruan tinggi (S1), jumlah perempuan (35) sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki (27), menunjukkan mulai adanya kesadaran pendidikan tinggi bagi perempuan meskipun dalam jumlah yang masih kecil. Ketimpangan ini bisa mencerminkan konstruksi sosial budaya yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, atau bisa pula disebabkan faktor ekonomi dan peran domestik yang lebih besar diemban perempuan sejak usia muda.

No.	FASILITAS PENDIDIKAN	SWASTA	NEGERI
1.	PAUD	1	3
2.	TAMAN KANAK-KANAK	2	2
3.	SEKOLAH DASAR	1	3
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0	1
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS	0	1

Meskipun tingkat Pendidikan di Kalurahan Kemadang masih dikategorikan rendah, ada beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kalurahan Kemadang itu sendiri. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan antara lain: penyaluran Program PIP, bantuan akses digitalisasi Pendidikan bagi pelajar Kemadang, dan bantuan fasilitas Pendidikan seperti pendirian gedung sekolah. Meskipun bantuan ini dilaksanakan atas instruksi supra desa, pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator sudah sangat baik dalam melakukan pelayanan, ini dibuktikan dengan adanya berbagai fasilitas Pendidikan baik swasta maupun Negeri yang didirikan di kalurahan Kemadang dari jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut data mengenai fasilitas Pendidikan di Kalurahan Kemadang.

## **Perubahan Persepsi Pendidikan di Masa Kini**

Titik balik kesadaran masyarakat Kemadang akan pentingnya pendidikan terjadi se kitar tahun 1996, ketika masyarakat Kemadang mulai menyadari bahwa sumber daya alam semakin menipis (ikan dan udang berkurang), sehingga tidak bisa lagi diandalkan. Pada akhirnya masyarakat Kemadang mulai menyadari bahwa pendidikan bisa memberikan alternatif penghidupan (misalnya, mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tinggi). Faktor pendorong perubahan pola pikir masyarakat ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan kebijakan dimana pemerintah membuat program seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul melalui program Apresiasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (AKBPM) untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dimana didalam program tersebut bantuan beasiswa dan pembangunan fasilitas sekolah mulai diperhatikan di Kalurahan Kemadang. Faktor pendorong lainnya yaitu pengaruh Lembaga Swasta dan perguruan tinggi yang membuat Lembaga Pusat Referensi Tempat Bacaan Masyarakat dan sanggar anak yang memberikan pendampingan belajar. Pemerintah Kalurahan juga berkolaborasi dengan UGM dalam program pemberdayaan masyarakat. Pengalaman generasi sebelumnya juga menjadi titik balik perubahan ini dimana orang tua yang merasakan susahya hidup tanpa pendidikan bertekad agar anaknya tidak mengulangi hal yang sama sehingga munculnya kesadaran "*anak saya harus lebih baik dari saya*".

Bukti Perubahan Persepsi ini dimana dapat dilihat pada data Pendidikan Kalurahan Kemadang dimana angka partisipasi sekolah meningkat, meskipun masih ada yang tidak sekolah ataupun putus sekolah. Para orang tua di Kalurahan Kemadang juga mulai memprioritaskan anak-anaknya untuk sekolah meski dengan keterbatasan ekonomi, dan munculnya keinginan anak-anak di Kalurahan Kemadang untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMA atau perguruan tinggi).

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan di Kalurahan Kemadang**

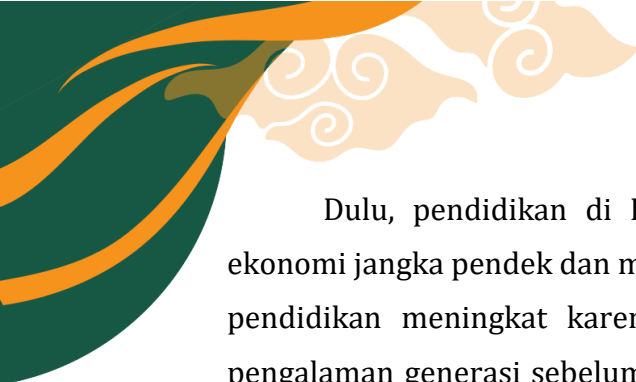
Walaupun perubahan persepsi pendidikan di Kalurahan mengalami peningkatan yang baik tetapi semua itu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pendidikan di Kalurahan Kemadang. Dari pandangan Bapak Sutrisno ada beberapa faktor pendukung pendidikan di Kalurahan Kemadang

seperti dukungan Pemerintah dimana anggaran pendidikan dari APBD untuk program peningkatan kapasitas dan juga dengan adanya kebijakan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang membantu anak kurang mampu. Faktor pendukung lainnya yaitu Peran Lembaga Sosial seperti sanggar anak memberikan bimbingan belajar gratis. Hal lainnya yaitu kesadaran orang tua di Kalurahan Kemadang dengan memberikan motivasi agar anak tidak mengalami kesulitan hidup seperti orang tuanya.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut tetapi tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat pendidikan di Kalurahan Kemadang. Menurut Bapak Sutrisno, ada beberapa faktor penghambat dalam pendidikan di Kalurahan Kemadang seperti faktor ekonomi dimana biaya transportasi dan kebutuhan sekolah masih menjadi beban. Kemudian infrastruktur seperti fasilitas sekolah yang minim dan jarak tempuh yang jauh. Faktor lainnya adalah dimana pada saat ini di Kalurahan Kemadang masih ada sebagian orang tua yang berpikir "*lebih baik kerja daripada sekolah lama-lama*". Hal ini dapat dilihat pada data pendidikan di Kalurahan Kemadang dimana angka Jenis Kelompok tidak sekolah mencapai 2.236. Dan faktor yang terakhir yaitu keterbatasan informasi dimana kurangnya pemahaman tentang peluang setelah lulus sekolah (misalnya, beasiswa atau lapangan kerja).

### **Dampak Perubahan Persepsi terhadap Kehidupan Masyarakat Kemadang**

Menurut Bapak Sutrisno, dampak perubahan persepsi pendidikan terhadap kehidupan masyarakat Kalurahan Kemadang sangatlah banyak. Dampak positif dari perubahan persepsi ini seperti peningkatan kualitas SDM dimana generasi muda Kemadang mulai memiliki keterampilan lebih, tidak hanya mengandalkan sektor tradisional. Dampak positif lainnya yaitu diversifikasi pekerjaan dimana mulai munculnya usaha pengolahan hasil laut (contoh: rumput laut tidak hanya dijual mentah). Perubahan pola pikir masyarakat Kemadang dimana pendidikan dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Walaupun memiliki banyak dampak positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti ketimpangan akses dimana anak di Kemadang yang berasal dari keluarga mampu lebih mudah sekolah, sementara yang kurang mampu masih kesulitan. Kemudian kurangnya lapangan kerja lokal dimana lulusan sekolah belum tentu mendapat pekerjaan layak di desa, sehingga banyak generasi muda Kemadang yang merantau. Perlunya pendampingan berkelanjutan dimana program pendidikan harus terus didukung agar tidak stagnan.



Dulu, pendidikan di Kemadang dipandang sebelah mata karena orientasi ekonomi jangka pendek dan melimpahnya SDA. Sekarang, kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkat karena perubahan kondisi alam, peran pemerintah, dan pengalaman generasi sebelumnya. Faktor pendukung (seperti kebijakan pemerintah dan lembaga sosial) telah membantu, tetapi hambatan (ekonomi, infrastruktur) masih ada. Dampak perubahan terlihat dari meningkatnya partisipasi sekolah dan diversifikasi mata pencaharian. Upaya peningkatan urgensi Pendidikan di berbagai tingkat masyarakat tidak bisa satu arah, namun dalam implementasinya harus ada pendekatan holistik yang mengatasi berbagai hambatan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan harus mampu hadir tidak hanya sebagai beban, tapi mampu sebagai peluang nyata untuk memperbaiki masa depan.

# PERLINDUNGAN SOSIAL: UPAYA KALURAHAN DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dimas Bangun Setyawan, Uul Resia Harahap,  
Rizqi Ika Nur Asri, Eni Susilowati

Desa Kemadang terbentuk melalui Peraturan Desa Kemadang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pembangunan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017. Desa Kemadang, yang terletak di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul, desa di Indonesia dengan letak paling selatan karena berbatahan langsung dengan Samudera Hindia dengan jumlah penduduk sekitar 7.000-an jiwa. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, dengan tambahan kegiatan sebagai pelaku wisata yang berkembang seiring meningkatnya sektor pariwisata daerah., Desa Kemadang telah melihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan terutama dari berbagai bentuk kekerasan. Untuk itulah Desa Kemadang bertransformasi menjadi desa berperspektif gender yang berkomitmen memberikan perlindungan komprehensif bagi seluruh warganya.

## **Forum Anak**

Salah satu inisiatif unggulan yang berjalan di Desa Kemadang adalah pembentukan Forum Anak Desa, yang menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan desa. Forum ini menjadi cikal bakal terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), sebuah gerakan berbasis warga yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Forum Anak di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, terbentuk sebagai bagian dari implementasi kebijakan Desa Layak Anak.

Pembentukan Forum Anak di Kemadang didorong oleh kebutuhan untuk memberikan wadah bagi anak-anak dalam menyuarakan hak dan kebutuhan mereka. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Sosialisasi. Pemerintah desa bersama pendamping dari SOS Children's Village mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak.
2. *Focus Group Discussion* (FGD). Dilakukan diskusi kelompok terfokus di tingkat desa untuk mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi anak-anak dan mencari solusi bersama.
3. Pembentukan Pengurus. Setelah FGD, dibentuklah struktur kepengurusan Forum Anak yang melibatkan anak-anak sebagai pengurus utama, didampingi oleh orang dewasa sebagai fasilitator.
4. Penyusunan Program Kerja. Forum Anak menyusun program kerja yang mencakup kegiatan edukatif, kreatif, dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak di desa.



Gambar 4: interview mahasiswa tentang perlindungan sosial di Kalurahan Kemadang

Forum ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal seperti Sanggar Anak Garu Luku serta Gerakan PATBM.

Forum Anak di Kalurahan Kemadang dikenal dengan nama FORANDAKA.17, yang merupakan kepanjangan dari Forum Anak Desa Kemadang 17 Dusun. Pemberian nama ini menunjukkan adanya keterlibatan seluruh 17 dusun di Kalurahan Kemadang dalam forum tersebut. Sejak pembentukannya, FORANDAKA.17 telah menjadi wadah bagi anak-anak di Kalurahan Kemadang untuk berorganisasi, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, sehingga mendukung terwujudnya Desa Layak Anak di wilayah tersebut.

### **Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)**

Kalurahan Kemadang memiliki potensi wisata yang cukup baik bahkan sampai dengan saat ini telah menjadi desa mandiri budaya. Kekayaan alam yang dimiliki Desa

Kemadang menjadi potensi besar namun sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas dikarenakan 38,39% warganya tidak sekolah/ tidak lulus SD, 31,30% warganya berpendidikan SD sederajat, 28,47% warganya berpendidikan menengah dan 1,84% warganya berpendidikan tinggi. Selain pendidikan masyarakatnya yang cenderung terbatas dengan tingginya wisatawan luar kota yang bebas keluar dan masuk menjadikan sebagian besar warganya yang bermata pencaharian petani menjadi menambah mata pencaharian menjadi pelaku wisata dan nelayan juga, dari sekian banyak keuntungan menjadi desa wisata. Hal ini berbanding lurus dengan kemungkinan pengaruh buruk dari luar yang bebas masuk ke wilayah Kalurahan Kemadang salah satunya penyebaran miras (minuman keras), narkoba dan gaya hidup bebas yang dapat mengubah tatanan hidup warga Desa Kemadang. Berikut adalah permasalahan yang muncul di Desa Kemadang (UGM, 2017):

1. Sebagian besar masyarakat Kalurahan Kemadang memiliki perekonomian menengah ke bawah, selain itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sehingga anak-anak harus ditinggalkan oleh orang tuanya dalam waktu yang cukup lama, terbatasnya waktu bagi anak dan orang tua untuk berkomunikasi.
2. Tingginya angka putus sekolah.
3. Banyak anak dan remaja yang mengkonsumsi miras dan merokok dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan barang tersebut serta minimnya pengawasan orang tua.
4. Kekerasan yang diterima oleh anak dikarenakan tidak adanya *bounding* antara anak dengan orang tua.
5. Tingginya angka seks bebas sehingga meningkatkan angka pernikahan dini dan anak stunting.
6. Adanya premanisme terutama di pesisir pantai dalam pengelolaan obyek wisata khususnya lahan parkir.

Dengan berbagai permasalahan di atas Pemerintah Daerah berupaya untuk mengurai masalah yang terjadi salah satunya dengan menangkap adanya dampak yang baik dari keberadaan Forum Anak Sanggar Garu Luku di Padukuhan Pucung. Oleh karena itu Pemerintah Desa Kemadang membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PATBM. PATBM di Desa Kemadang

dibentuk tahun 2016-2017, digerakkan oleh relawan masyarakat, salah satunya adalah Wasito, yang secara sukarela menjadi aktivis PATBM dan telah mendapatkan SK dari Lurah. Berbekal semangat dan kesadaran tinggi, beliau dan tim, aktif mengkampanyekan perlindungan anak dengan pendekatan budaya, seperti melalui pertunjukan ketoprak keliling desa. Dalam pelaksanaannya, PATBM berkolaborasi erat dengan para dukuh melalui PKK dan Karang Taruna, sehingga sistem pelaporan kasus bisa dilakukan secara langsung melalui tokoh masyarakat setempat, melaksanakan operasi miras di loket retribusi untuk meminimalisasi masuknya miras ke Desa Kemadang. Bahkan dalam beberapa kasus, kolaborasi ini meluas hingga ke pihak Polres. PATBM berfungsi untuk:

- a. Mendampingi masyarakat sebagai tindakan preventif terhadap pembulian anak berkolaborasi dengan Polres
- b. Meminimalisir pernikahan di bawah umur
- c. Mensosialisasikan kepada Ibu Rumah Tangga (IRT) terkait penanganan KDRT
- d. Menekan pergaulan bebas

Desa Kemadang juga menunjukkan prestasi dalam menekan angka pernikahan dini, yang kini hampir tidak ditemukan berkat sosialisasi yang konsisten dan pendekatan berbasis keluarga. Selain itu, kegiatan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta dampak pergaulan bebas terus digencarkan oleh pihak desa bersama kader PKK, yang turut aktif dalam proses edukasi masyarakat.

### **Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPPK)**

Dalam upayanya dalam mewujudkan perlindungan sosial khususnya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak di Kalurahan Kemadang, maka dibentuklah FPPK di tingkat Kapanewon Tanjungsari. Keanggotaan FPPK ini terdiri dari Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, Korwil Bidang Pendidikan, PKK, Karang Taruna, dan masyarakat. Upaya perlindungan sosial di Kalurahan Kemadang dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak stake holder, dan hal ini didukung penuh oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Gunungkidul. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bimbingan teknis

manajemen penanganan kasus yang rutin diadakan Dinsos P3A bagi petugas di tingkat Kalurahan. Selain itu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah DinsosP3A memudahkan petugas Kalurahan Kemadang untuk berkoordinasi dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi.

### **Desa Ramah Anak**

Desa ini telah dikenal sebagai Desa Ramah Anak, yang menunjukkan komitmen kolektif masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk mendukung perkembangan anak secara holistik, desa menyediakan berbagai fasilitasi kegiatan dan pelatihan, termasuk pembangunan sanggar permainan tradisional. Sanggar ini tidak hanya menjadi tempat bermain anak, tetapi juga sarana untuk melestarikan budaya lokal serta mencegah ketergantungan anak pada *gadget* yang berlebihan.

Desa Kemadang merupakan desa pertama di Gunungkidul sebagai pioner Desa Layak Anak sejak Oktober 2012 atas dasar inisiatif dari pemerintah desa sendiri. Dalam rangka mendukung program kerja pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan hak anak, maka dibentuklah gugus tugas Desa Layak Anak Desa Kemadang, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kemadang Nomor 11/KPTS/2012 (Rahmawati, 2018).

Kalurahan Kemadang dikenal sebagai wilayah dengan destinasi wisata populer seperti Pantai Pulang Sawal (Indrayanti), sehingga tingkat kerawanan relatif tinggi terhadap eksploitasi anak dan peredaran zat adiktif terlarang. Di tengah banyaknya pengunjung wisata, dibutuhkan strategi yang terpadu, partisipatif, dan berbasis komunitas dalam melakukan pencegahan perdagangan anak di mana merupakan bagian dari TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang) dan peredaran NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).

Dalam menangani berbagai kasus, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Desa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menggelar operasi penertiban terhadap peredaran minuman keras dan senjata tajam, serta secara tegas menolak keberadaan tempat-tempat lokalisasi. Selain itu, telah dideklarasikan Desa Kemadang sebagai desa bebas narkoba, yang menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sehat dan aman.

Tak kalah penting, masyarakat yang putus sekolah diberikan akses pendidikan melalui program Kejar Paket, dan pembinaan rohani yang secara rutin dilakukan di berbagai tempat ibadah. Dalam menangani kasus-kasus khusus seperti kehamilan di luar nikah, pendekatan yang diambil adalah kekeluargaan, untuk menjaga keseimbangan antara nilai moral dan perlindungan sosial. Melalui berbagai inisiatif ini, Desa Kemadang menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan. Sinergi antara Pemerintah Desa, masyarakat, tokoh adat, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan desa yang inklusif, aman, dan sejahtera bagi semua warganya.

Program Bina Keluarga Sejahtera. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi utama perlindungan sosial. Keluarga merupakan support system terbaik buat tumbuh kembang anak maupun perlindungan bagi perempuan itu sendiri. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gender. Program ini dibentuk bukan hanya demi peningkatan ekonomi keluarga semata, namun memastikan bahwa perempuan juga memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bahari Sejahtera, Kalurahan Kemadang memberikan akses kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian. Hal ini bukan sekedar akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun juga akan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Program Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan. Kalurahan Kemadang secara rutin menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi ini tidak harus dengan pertemuan khusus melainkan dengan cara diselipkan dalam acara-acara tertentu seperti PKK, Rapat Desa, Kegiatan Arisan, pertemuan RT, dan lain-lain (Rahmawati, 2018). Bahkan menurut informan penulis, Wasito, pendekatan dari sisi keagamaan juga dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan di Masjid maupun Gereja. Masih menurut informan penulis, Wasito sukarelawan PATBM, upaya penekanan kasus pernikahan dini dilakukan dengan sosialisasi dengan topik tentang bahayanya penyakit yang berisiko saat pernikahan dini dilakukan dan bahaya pergaulan bebas.

## Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan Sosial

Dampak signifikan dari berjalannya program perlindungan sosial di Kalurahan Kemadang ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Hal ini tampak dari kasus-kasus kekerasan yang dihadapi di desa dari tahun ke tahun tampak menurun menurut informan, Wasito. Meskipun data kasus kekerasan tidak bisa ditemukan secara spesifik, namun penanganan secara kekeluargaan diberlakukan di Kalurahan Kemadang ini. Jika terjadi kasus, biasanya hanya sampai di pedukuhan, diselesaikan antar keluarga, sehingga tidak sampai ke DinsosP3A ataupun UPT PPA Gunungkidul.

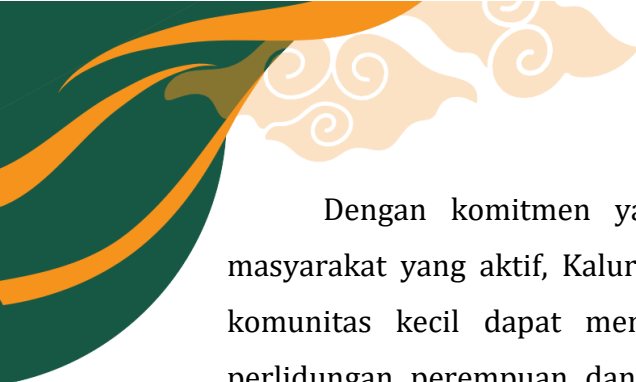
Kalurahan Kemadang yang bertransformasi menjadi desa berperspektif gender telah mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan dalam pembangunan desa. Perempuan tidak lagi menjadi obyek pembangunan namun lebih dari itu, dapat aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan, implementasi, maupun evaluasi program-program pembangunan.

Meskipun Kalurahan Kemadang telah mencapai berbagai kemajuan dalam implementasi perlindungannya, namun masih terdapat beberapa tantangan:

1. Sumber Daya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengembangan program perlindungan sosial ke depan.
2. Koordinasi Lintas Sektor. Meskipun sudah ada jejaring rujukan seperti UPT PPA, DinsosP3A, Posek, namun efektivitas penanganan kasus masih perlu dipastikan, mengingat kanal-kanal pelaporan belum banyak tersedia di Kalurahan Kemadang.
3. *Sustainability Programme*. Program yang berkelanjutan perlu dipastikan, terutama saat terjadi pergantian pimpinan.

Model perlindungan sosial yang dimiliki Kalurahan Kemadang memiliki potensi besar untuk direplika di daerah lain, tentunya dengan karakteristik sosial ekonomi perdesaan yang serupa. Faktor pendukungnya antara lain:

1. Kesederhanaan konsep, konsep yang dikembangkan tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga bisa diadaptasi dengan mudah.
2. Fleksibilitas, model perlindungan sosial ini bisa disesuaikan menurut kondisi dan karakteristik lokal masing-masing daerah.
3. *Sustainability*, program yang dikembangkan semata-mata mengandalkan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga tingkat *sustainability*-nya cukup tinggi.



Dengan komitmen yang kuat, kepemimpinan yang visioner, partisipasi masyarakat yang aktif, Kalurahan Kemadang mampu menunjukkan bahwa sebuah komunitas kecil dapat mengubah kondisi sosial secara signifikan dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Transformasi Kalurahan Kemadang dari desa tradisional sederhana menjadi desa berperspektif gender yang telah memiliki sistem perlindungan sosial dalam waktu yang singkat merupakan pencapaian yang luar biasa.

Program-program perlindungan sosial yang dikembangkan telah mampu mengubah mindset masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Tantangan yang dihadapi masih merupakan hal natural dalam bertransformasi, namun yang terpenting adalah komitmen untuk terus melakukan perbaikan harus selalu terjaga.

Kisah Kalurahan Kemadang ini bukan sekedar cerita Desa yang berhasil melindungi perempuan dan anak, lebih dari itu, terdapat kekuatan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif dari tingkat akar rumput. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua perlindungan sosial yang efektif membutuhkan sumber daya besar, namun sekali lagi lebih menitikberatkan pada komitmen bersama. Dengan cerita Kalurahan Kemadang ini, diharapkan menjadi model inspiratif bagi daerah lain untuk menciptakan kesetaraan gender, termasuk kaum rentan, di mana di dalamnya termasuk perempuan dan anak.

# **TRANSFORMASI UMKM: DINAMIKA TERKINI PENGUATAN EKONOMI LOKAL MELALUI KOLABORASI DAN INOVASI KOMUNITAS**

Tri Jaka, Danuri Setyawan, Chrisbiyanto Eko Priyono, Ervina

Kalurahan ini bukan sekadar titik di peta Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Ia adalah nadi yang berdetak di antara alam yang keras dan hati yang hangat. Kemadang adalah rumah bagi lebih dari tujuh ribu jiwa, yang hidup dalam harmoni dengan tanah kapur yang tandus namun penuh berkah. Di kalurahan Kemadang, musim kemarau panjang bukanlah kutukan, tapi tantangan yang dihadapi dengan gotong royong dan ketabahan. Di antara ladang-ladang kering dan bukit-bukit batu, tumbuh semangat petani yang sabar, nelayan yang berani, dan ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai luhur. Pertumbuhan Kalurahan Kemadang sebagai pusat wisata pantai merupakan hal yang sangat menggembirakan. Bagaimana Tidak? Awalnya Kalurahan Kemadang hanya memiliki 2 Obyek wisata pantai, yaitu Pantai Baron dan Kukup. Namun saat ini Kalurahan Kemadang terdapat 9 Obyek wisata pantai, yang meliputi : Pantai Baron, Kukup, Drini, Sepanjang, Porok, Lolang, Sanglen, Ngrawe (Mesra), Watu Kodok. Adanya perkembangan kuantitas obyek wisata pantai di Kalurahan Kemadang berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di kalurahan Kemadang. Dinamika dalam pembukaan obyek wisata pantai adalah adanya semangat gotong royong dari masyarakat Kalurahan Kemadang dan fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Kemadang. Gotong royong diawali dengan pembukaan jalan menuju pantai, ada sebagian warga yang merelakan tanahnya untuk jalan menuju pantai yang akan dibuka untuk obyek wisata pantai.

## **UMKM Kemadang mau dibawa kemana?**

Informan/Narasumber yang kami wawancarai adalah Pegiat UMKM Kalurahan Kemadang sekaligus sebagai perangkat kalurahan (Dukuh Kelor Lor) yang dijabat oleh Bapak Hendri Sukarno. Beberapa pertanyaan telah kami persiapkan untuk mempermudah alur cerita yang disampaikan oleh Informan/Narasumber. Kalurahan Kemadang, wilayah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul, sejak lama menjadi pusat pertumbuhan wisata di kawasan selatan DIY. Namun di balik geliat pariwisata,

masyarakat Kemadang menghadapi tantangan struktural: lapangan kerja terbatas, ketergantungan pada sektor informal, serta minimnya diversifikasi pendapatan rumah tangga. Untuk menjawab persoalan ini, sejak 2020 pemerintah kalurahan memprakarsai pengorganisasian UMKM secara terstruktur, dengan tujuan membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara potensi lokal, tata kelola kelembagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh sebagai penggerak utama kesejahteraan kolektif. Ada 4 Pilar Desa Mandiri Budaya di Gunungkidul yang meliputi Desa Prima, Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Budaya.



Gambar 5: interview mahasiswa tentang Transformasi UMKM di Kalurahan Kemadang

Desa Prima banyak diisi oleh pelaku UMKM dari kaum hawa/ibu-ibu, seperti Keripik, rumput laut, dan makanan. Sedangkan Desa Preneur diisi oleh pelaku UMKM dari kaum laki-laki seperti kerajinan Batik Ecoprint dan pengelolaan parkir. Saat ini, menurut informasi dari Narasumber, jumlah pelaku UMKM di Kalurahan Kemadang dikelompokkan dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku UMKM
1.	Peyek	200
2.	Stik dan Makanan	30
3.	Batik Eco Print	12
4.	Kerajinan Kece	25

Para Pelaku UMKM tersebut rutin mengadakan pertemuan setiap Selapanan (35 hari) untuk membahas program kegiatan serta ajang silaturahmi dan koordinasi.

Struktur pengorganisasian UMKM di Kemadang kini berkembang lebih kompleks dan adaptif. Forum UMKM yang dulu bersifat informal telah berkembang menjadi Ekosistem UMKM Kalurahan yang terdiri dari:

- a. Forum Komunikasi UMKM Kalurahan Kemadang sebagai ruang musyawarah pelaku usaha, dengan klaster berbasis jenis usaha: kuliner laut, kerajinan kerang, tenun tradisional, dan jasa wisata.

- b. Koperasi UMKM Kemadang Mandiri berfungsi sebagai badan usaha kolektif, mengelola simpan pinjam, distribusi bahan baku, serta memfasilitasi legalitas produk.
- c. Unit Digitalisasi dan Pemasaran Desa (UDPD) dibentuk tahun 2023, unit ini mengelola promosi digital, market online, serta edukasi e-commerce bagi anggota UMKM.

### **Program Strategis UMKM: Adaptasi, Inovasi, dan Inklusi**

Program pemberdayaan UMKM telah mengalami transformasi dari yang semula berbasis pelatihan teknis menjadi pengembangan berbasis inovasi dan rantai nilai (value chain). Adapun program strategis yang terbaru adalah sebagai berikut:

- a. Inkubasi Produk Unggulan Desa (IPUD), pada setiap kluster. didorong untuk menghasilkan satu produk unggulan desa yang layak dikembangkan sebagai produk ekspor. Kluster kerajinan kerang, misalnya, kini memproduksi souvenir tematik wisata berbasis daur ulang.
- b. Digitalisasi UMKM Lokal. Pemerintah kalurahan Kemadang menggandeng mahasiswa KKN dan relawan digital desa untuk membuat katalog digital, pelatihan marketplace, hingga optimalisasi media sosial. Tahun 2024, setidaknya 45 pelaku UMKM telah aktif di Tokopedia dan Shopee.
- c. Program “Desa Menjual”. Sinergi antar BUMDes, koperasi, dan UMKM dalam pengelolaan Galeri UMKM dan sistem distribusi produk hingga ke luar wilayah Gunungkidul.

### **Dukungan Kalurahan: Modal, Infrastruktur, dan Promosi**

Pemerintah Kalurahan Kemadang dibawah Nahkoda Bapak Sutono kini lebih sistematis dalam memberikan dukungan. Adapun dukungan untuk UMKM di Kaurahan Kemadang tidak hanya melulu Soal Modal, tetapi juga Infrastruktur, Promosi, dan Branding. Bantuan Modal melalui Dana Desa, koperasi diberi penyertaan modal usaha produktif, yang disalurkan dengan sistem rolling kepada UMKM yang tergabung aktif. Bantuan Infrastruktur dengan didirikannya Pusat Produksi Bersama (PPB) yang difungsikan sebagai ruang olahan pangan dan tenun, dengan fasilitas mesin produksi, pengepakan, dan cold storage mini. Sedangkan Bantuan Promosi dan Branding, Pemerintah Kalurahan Kemadang mengagas kampanye “Produk

Kemadang” yang disosialisasikan melalui media desa, kegiatan wisata, dan mitra hotel. Selain itu bantuan modal juga dari Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Produk keripik rumput laut dan sabun kerang kini telah menjadi souvenir standar bagi wisatawan di Pantai Baron dan pantai lain di wilayah Kalurahan Kemadang.

### **Tantangan Aktual UMKM: Integrasi Digital dan Konsistensi Produksi**

Tiada Gading yang Tak Retak, itulah ungkapan yang aktual untuk perkembangan UMKM di Kalurahan Kemadang saat ini. Meskipun mengalami pertumbuhan pesat, UMKM di Kemadang juga dihadapkan pada tantangan, antara lain adalah : Adanya Kesenjangan Digital dan Konsistensi dan Mutu Produk. Tidak semua pelaku usaha memiliki gawai pintar atau terbiasa dengan teknologi digital, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran bertahap dan pendampingan berkelanjutan. Permintaan pasar meningkat, namun sebagian kelompok belum mampu menjaga konsistensi volume dan mutu produk secara berkelanjutan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan atau struktur organisasi internal. Informasi tambahan dari Narasumber, Tantangan yang tidak kalah berat yaitu adanya pelaku UMKM di Kalurahan Kemadang yang terjerat Rentenir dan atau Pinjaman Online. Namun demikian, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat punya resep jitu untuk mengantisipasi serangan rentenir dan atau pinjaman online yaitu dengan adanya Instruksi Lurah Kemadang tentang Bahaya Pinjaman Online dan Judi Online. Selain itu juga adanya solusi program simpan pinjam dari Badan Usaha Milik Kalurahan dan UP2K.

### **Strategi Peningkatan Kapasitas**

Upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM difokuskan pada tiga aspek sebagai berikut : Pendidikan usaha berkelanjutan dalam bentuk pelatihan modul mingguan, kelas daring, hingga magang antar-UMKM desa; Mentoring dan fasilitasi legalisasi dengan pendampingan dari mitra perguruan tinggi dan dinas koperasi DIY, legalitas seperti sertifikat halal, izin edar BPOM, dan NIB difasilitasi penuh; serta kompetisi inovasi produk, diadakan tahunan, memberi ruang pelaku usaha untuk memamerkan inovasi, menjaring mitra, dan memenangkan insentif pengembangan. Ada juga peningkatan kapasitas berupa Pelatihan Packaging yang diselenggarakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Gunungkidul. Ada juga pelatihan untuk Pemandu Wisata yang dilaksanakan di Desa Wisata Pentingsari Cangkringan Sleman. Dengan adanya pelatihan untuk Pemandu wisata ini diharapkan Pelaku Wisata di Kamadang mampu menyelenggarakan Outbound di wilayah Kalurahan Kemadang.

Pemerintah Kalurahan Kemadang berfungsi sebagai katalisator yang mempertemukan pelaku usaha dengan stakeholder/pemangku kepentingan terkait. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Perguruan Tinggi (UGM, UPN), LSM lokal, serta mahasiswa KKN berkontribusi dalam riset pasar, pendampingan bisnis, dan pengembangan inovasi. Sementara itu, masyarakat terlibat sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, hingga bagian dari ekosistem pemasaran lokal.

### **Indikator Keberhasilan Terkini**

Hingga pertengahan Tahun 2025, beberapa capaian penting UMKM Kalurahan Kemadang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah UMKM aktif meningkat dari 47 unit menjadi 83 unit usaha aktif pada Tahun 2021.
- b. Pendapatan rata-rata pelaku UMKM naik sebesar 45%.
- c. Produk olahan rumput laut dan sabun kerang berhasil menembus pasar ekspor ke Malaysia melalui distributor lokal.
- d. Tercipta 53 lapangan kerja baru, sebagian besar dari sektor pengolahan dan distribusi.
- e. Sebanyak 70% produk telah memiliki legalitas usaha dan kemasan layak ekspor.

### **Rencana Pengembangan UMKM ke Depan**

Langkah strategis ke depan antara lain:

- a. Pemerintah Kalurahan akan membuat Rest Area dan kerjasama dengan Obelix Sea View sehingga didalam Obyek Wisata Obelix Sea View pelaku UMKM Kalurahan Kemadang bisa ikut memasarkan produknya.
- b. Pengembangan “Digital Village Market” berbasis website desa dan integrasi katalog digital seluruh UMKM.
- c. Kemitraan antar desa wisata di Gunungkidul untuk membentuk jejaring distribusi dan promosi regional.

- d. Program regenerasi usaha, dengan melibatkan pelajar dan pemuda dalam pelatihan kewirausahaan desa.
- e. Standarisasi mutu dan sertifikasi kolektif UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional dan ekspor.

Saat ini, masyarakat mulai melihat UMKM bukan hanya sebagai pilihan alternatif, tetapi sebagai kekuatan ekonomi utama desa. UMKM dianggap sebagai solusi konkret atas persoalan pengangguran, ketergantungan musiman, dan minimnya akses pekerjaan formal. Secara sosial, pengorganisasian UMKM juga memperkuat solidaritas, menumbuhkan kepercayaan komunitas, dan memperbesar partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Perjalanan UMKM Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul hingga Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi kalurahan memerlukan pendekatan komprehensif antara lain penguatan kapasitas, dukungan kelembagaan, fasilitasi modal dan digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk tumbuh dan dikelola dalam sistem yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan yang dapat dicapai dari akar rumput masyarakat. "Kemadang bukan hanya sebuah desa, tapi cermin ketangguhan manusia yang bersahabat dengan alam."

# REVITALISASI BUDAYA: PENGUATAN ORGANISASI BUDAYA KALURAHAN KEMADANG

Marcellino Pratama, Muhammad Fatchul Annaji,  
Adrianus Oulaana, Fadila Agvina

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh status keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan ini mencakup lima bidang strategis, yaitu tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam konteks penguatan budaya, keistimewaan ini memberikan ruang dan kewenangan khusus bagi DIY untuk merancang dan mengelola sistem sosial budaya, termasuk di tingkat kalurahan, sebagai bagian penting dari struktur sosial yang masih kuat mengakar.

Kalurahan di DIY memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari desa-desa lain di Indonesia. Keberadaan Kalurahan sebagai entitas pemerintahan lokal sekaligus penjaga nilai-nilai budaya tradisional, menjadikan desa bukan sekadar unit administratif, tetapi juga sebagai ruang hidup kebudayaan yang dinamis. Dalam sistem ini, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga menjadi penggerak utama revitalisasi budaya lokal, melalui penguatan kelembagaan budaya yang ada di tingkat desa.

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan UU Keistimewaan dalam bidang kebudayaan, lahirlah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di DIY, yang memberikan dasar hukum bagi program-program strategis kebudayaan. Salah satu program unggulannya adalah pengembangan Kalurahan Mandiri Budaya, yang menjadi motor utama dalam upaya revitalisasi budaya berbasis masyarakat.



Gambar 6: interview mahasiswa tentang Revitalisasi budaya di Kalurahan Kemadang

Melalui program ini, Kalurahan didorong untuk menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Pemerintah Kalurahan berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi budaya yang ada, memfasilitasi organisasi budaya masyarakat, serta menyediakan dukungan berupa anggaran, pelatihan, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, pemerintah Kalurahan juga diharapkan menyusun regulasi internal, seperti peraturan kalurahan, guna memberikan payung hukum bagi kelangsungan organisasi budaya yang ada. Dalam konteks ini, organisasi-organisasi budaya di tingkat kalurahan menjadi garda depan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi, seni, bahasa, serta kearifan lokal, yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator, mendorong partisipasi masyarakat, membangun jejaring antar-kalurahan, serta memperkuat sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Melalui revitalisasi budaya ini, Yogyakarta tidak hanya berupaya menjaga warisan budaya masa lalu, tetapi juga mentransformasikannya menjadi kekuatan sosial dan ekonomi masa kini dan masa depan. Penguatan organisasi budaya di kalurahan menjadi bagian penting dalam strategi membangun masyarakat yang berakar kuat pada budaya, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Ini adalah wujud konkret dari semangat dari desa, oleh desa, dan untuk desa dalam menjaga keberlanjutan keistimewaan Yogyakarta melalui budaya.

### **Penguatan Organisasi Budaya Di Kalurahan Kemadang**

Kalurahan Kemadang yang terletak di wilayah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan hanya dikenal luas karena keindahan alamnya. Pantai-pantai ikonik seperti Baron, Kukup, Drini, dan Sepanjang menjadi magnet utama pariwisata, namun di balik gemuruh ombak dan pasir putih yang memesona, tersimpan kekayaan budaya yang hidup dan dinamis. Kemadang bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang sosial-kultural yang membentuk identitas kolektif warganya.

Masyarakat Kemadang hidup dalam jalinan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks inilah, upaya penguatan organisasi budaya menjadi sangat penting, tidak sekadar untuk melestarikan seni dan tradisi, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan desa yang berkarakter dan berdaya saing.

## Nilai-Nilai Budaya di Kalurahan Kemadang

Budaya Kemadang bertumpu pada sistem nilai yang dalam, yang telah dibentuk sejak masa para leluhur. Nilai gotong royong, rasa hormat terhadap alam dan leluhur, sopan santun, serta spiritualitas kolektif menjadi kekuatan utama yang menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi semangat dalam kegiatan adat, tetapi juga mewarnai interaksi sosial sehari-hari, mulai dari kegiatan pertanian, nelayan, hingga kerja bakti lingkungan.

### a. Tradisi sebagai Refleksi Keseimbangan

Salah satu manifestasi paling nyata dari penguatan organisasi budaya di Kalurahan Kemadang tampak dalam keberlanjutan pelaksanaan tradisi-tradisi lokal seperti Bersih Dusun, Kenduri, Merti Bumi, dan Selamatan Panen. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari ritual spiritual masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting sebagai wadah pengorganisasian komunitas budaya di tingkat padukuhan. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan rasa syukur atas anugerah alam diaktualisasikan secara bersama-sama. Organisasi budaya lokal kerap menjadi motor penggerak utama dalam merancang, mempersiapkan, hingga melaksanakan ritual-ritual tersebut mulai dari koordinasi warga, penyusunan rangkaian acara, hingga penyajian kesenian tradisional sebagai bagian dari prosesi.

Partisipasi aktif masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk membawa makanan dari rumah masing-masing untuk disantap bersama, bukan hanya mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, tetapi juga menegaskan peran organisasi budaya sebagai ruang pengikat sosial yang menjaga kohesi dan identitas kolektif desa. Tradisi semacam ini menjadi tulang punggung sekaligus momentum penguatan struktur sosial budaya Kemadang yang berakar kuat dan tetap hidup di tengah perubahan zaman

### b. Seni sebagai Warisan dan Identitas

Penguatan organisasi budaya di Kalurahan Kemadang tidak dapat dipisahkan dari peran penting seni pertunjukan tradisional yang telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Kelompok-kelompok seni rakyat seperti Gejog Lesung, Jathilan, Reog, Karawitan, dan Ketoprak terus hidup dan berkembang, menjadi ujung tombak dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta momen-momen penting dalam sektor pariwisata desa.

Keberadaan kelompok seni ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, penanaman nilai moral, serta simbol yang memperkuat identitas budaya lokal. Melalui pentas-pentas seni, masyarakat tidak hanya menikmati keindahan estetika, tetapi juga meresapi nilai-nilai luhur seperti kerja sama, disiplin, spiritualitas, dan rasa hormat terhadap tradisi. Yang menarik, organisasi seni di Kemadang bersifat inklusif lintas usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia berpartisipasi aktif dalam latihan maupun pementasan. Ini menunjukkan bahwa seni di Kemadang bukanlah ruang eksklusif, melainkan ruang kebudayaan bersama yang menyatukan warga dari berbagai latar belakang. Keterlibatan lintas generasi ini menjadi kekuatan utama organisasi budaya dalam menjaga kontinuitas dan relevansi tradisi di tengah tantangan zaman.

Dengan struktur kelompok yang semakin tertata, dukungan pemerintah kalurahan, dan semangat gotong royong warga, seni pertunjukan di Kemadang telah menjadi basis penting dalam penguatan organisasi budaya. Ia bukan hanya wadah ekspresi, tetapi juga alat transfer nilai, wahana edukasi kultural, dan medium perekat sosial yang menjamin bahwa warisan budaya terus hidup, dinamis, dan bermakna dari generasi ke generasi.

### **Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Organisasi Budaya**

Dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang serta tantangan modernisasi dan komersialisasi sektor pariwisata, Pemerintah Kalurahan Kemadang tidak tinggal diam. Sebaliknya, pemerintah kalurahan mengambil peran strategis sebagai penggerak utama dalam penguatan organisasi budaya di tingkat lokal. Kesadaran bahwa budaya bukan sekadar warisan simbolik, tetapi fondasi identitas dan daya tahan sosial masyarakat, mendorong kalurahan untuk hadir secara aktif dalam proses pelestarian tersebut.

Penguatan organisasi budaya di Kemadang tidak dilakukan secara seremonial atau simbolik belaka, melainkan dijalankan melalui langkah-langkah nyata yang menyentuh tiga aspek utama: struktur organisasi, dukungan pendanaan, dan penguatan kelembagaan. Pemerintah kalurahan secara bertahap membangun sistem yang memungkinkan kelompok seni dan budaya beroperasi secara mandiri, berdaya,

dan berkelanjutan. Melalui penganggaran khusus dalam APBKal, penyediaan fasilitas latihan dan pertunjukan, hingga penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kalurahan, Kemadang menunjukkan komitmennya untuk menjadikan budaya sebagai pilar pembangunan desa yang kokoh.

Langkah ini mencerminkan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menjaga bentuk luar tradisi, tetapi harus disertai dengan penguatan organisasi budaya sebagai institusi sosial yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus beregenerasi dalam jangka panjang.

a. Anggaran Budaya dalam APBKal

Salah satu bentuk nyata dari penguatan organisasi budaya di Kalurahan Kemadang tampak dalam komitmen anggaran yang dikelola oleh pemerintah kalurahan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), pemerintah secara rutin mengalokasikan pos khusus untuk kegiatan kebudayaan, sebagai wujud keberpihakan terhadap pelestarian dan pengembangan seni tradisional di tingkat desa. Alokasi anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan strategis yang mendukung keberlangsungan organisasi budaya, seperti biaya operasional kelompok seni, pengadaan dan perawatan alat musik tradisional seperti gamelan, penyediaan kostum pentas, hingga dukungan logistik seperti transportasi dan konsumsi saat kelompok seni tampil dalam kegiatan lokal maupun undangan di luar desa. Fasilitas ini sangat membantu kelompok seni dalam menjalankan aktivitas mereka secara terencana dan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa budaya di Kemadang tidak dipandang sebagai elemen dekoratif atau pelengkap seremoni semata, melainkan bagian penting dari sistem pembangunan desa. Budaya diposisikan sebagai penggerak sosial dan ekonomi, tempat nilai-nilai lokal diperkuat, solidaritas dibangun, dan potensi kreatif masyarakat dikembangkan secara inklusif.

Dengan dukungan anggaran yang jelas dan terstruktur, organisasi budaya di Kalurahan Kemadang memiliki landasan yang kokoh untuk tumbuh, melakukan regenerasi, serta memperluas jangkauan karya dan pengaruhnya. Ini sekaligus menjadi cerminan bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan desa dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan identitas budayanya secara mandiri dan berdaya.

#### b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budaya

Sebagai bagian dari strategi penguatan organisasi budaya, Pemerintah Kalurahan Kemadang tidak hanya berhenti pada aspek pendanaan, tetapi juga memberikan dukungan sarana fisik yang menjadi elemen penting dalam membentuk ekosistem budaya desa yang aktif dan berkelanjutan. Fasilitas seperti balai kalurahan, sanggar desa, aula padukuhan, hingga ruang-ruang terbuka dimanfaatkan sebagai tempat latihan seni, pertunjukan, dan pertemuan kebudayaan oleh berbagai kelompok seni yang ada di masyarakat.

Penyediaan fasilitas ini mencerminkan keberpihakan struktural kalurahan terhadap aktivitas seni-budaya sebagai bagian dari kehidupan sosial warga. Ruang-ruang tersebut bukan hanya menjadi tempat berkegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran, laboratorium ekspresi budaya, dan wadah penguatan jejaring antar-komunitas seni di berbagai padukuhan. Dengan adanya ruang yang aman dan nyaman, seniman desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperkuat soliditas organisasi seni mereka secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pemerintah kalurahan juga aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi budaya dengan menghadirkan pelatih profesional apabila dibutuhkan. Baik untuk pelatihan tari, karawitan, teater rakyat, hingga seni pertunjukan lainnya, kalurahan membuka ruang kolaborasi dengan seniman lokal, sanggar seni profesional, maupun lembaga seperti dinas kebudayaan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas teknik pertunjukan, tetapi juga memperkuat legitimasi kelompok seni sebagai bagian dari aktor pembangunan budaya desa.

Melalui pendekatan ini, organisasi budaya di Kemadang tidak hanya memiliki tempat untuk berkarya, tetapi juga memiliki akses terhadap peningkatan kapasitas dan jejaring kerja yang lebih luas. Hal ini menjadikan organisasi budaya lebih siap secara struktur dan kualitas dalam menghadapi tantangan pelestarian tradisi di era yang terus berubah.

#### c. Fasilitasi dalam Event Budaya di Tingkat Eksternal

Dalam kerangka penguatan organisasi budaya, Pemerintah Kalurahan Kemadang juga menaruh perhatian besar pada aspek promosi dan pengembangan jejaring seni-budaya. Salah satu strategi yang dijalankan adalah dengan mendorong partisipasi aktif kelompok seni dalam berbagai event budaya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga kegiatan berskala nasional.

Keterlibatan dalam ajang seperti Festival Budaya DIY, Pentas Seni Desa Wisata, maupun event pariwisata tahunan menjadi peluang strategis bagi organisasi budaya Kemadang untuk memperluas ruang ekspresi, memperkenalkan identitas budaya desa kepada publik yang lebih luas, serta membangun reputasi Kemadang sebagai desa yang kaya akan tradisi dan kreativitas seni.

Demi menunjang partisipasi tersebut, pemerintah kalurahan memberikan dukungan logistik secara langsung, seperti transportasi, konsumsi, hingga akomodasi bagi anggota kelompok seni yang terlibat. Bantuan ini bukan hanya meringankan beban operasional, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan motivasi bagi pelaku budaya, sehingga mereka merasa didukung, dihargai, dan percaya diri dalam membawa nama baik desa ke panggung budaya yang lebih luas. Pendekatan ini juga memperkuat posisi organisasi budaya sebagai duta budaya desa, yang tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga mengangkat martabat desa melalui diplomasi budaya. Dengan tampil di luar wilayah, kelompok seni tidak hanya membawakan pertunjukan, tetapi juga mengkomunikasikan nilai, sejarah, dan jati diri masyarakat Kemadang kepada khalayak lebih luas. Melalui fasilitasi ini, organisasi budaya di Kemadang mendapatkan ruang aktualisasi, pengakuan sosial, dan kesempatan pengembangan kapasitas. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan desa berbasis budaya yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan.

d. Payung Hukum melalui Peraturan Kalurahan

Sebagai bagian dari upaya sistematis dalam penguatan organisasi budaya, Pemerintah Kalurahan Kemadang tidak hanya fokus pada dukungan teknis dan finansial, tetapi juga menegaskan komitmennya melalui kebijakan formal yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kalurahan (Perkal) tentang Pelestarian dan Penguatan Kelembagaan Budaya. Kehadiran Perkal ini merupakan tonggak penting dalam membangun kerangka hukum yang melindungi eksistensi, memperkuat peran, serta menjamin keberlanjutan organisasi budaya di tingkat lokal.

Peraturan ini menjadi fondasi hukum yang mengikat, yang mengatur secara jelas berbagai aspek kelembagaan budaya. Mulai dari struktur organisasi seni tingkat desa dan padukuhan, mekanisme penyusunan dan pengajuan program budaya, sistem pendanaan, hingga prinsip-prinsip kolaborasi antar kelompok seni,

pemerintah kalurahan, dan pelaku pariwisata. Dengan adanya regulasi ini, kegiatan budaya tidak lagi berdiri di ruang informal yang rawan terpinggirkan, tetapi telah masuk ke dalam sistem tata kelola desa yang formal dan terstruktur.

Lebih dari itu, Perkal Budaya ini juga berfungsi sebagai jembatan sinergi antara pelaku budaya, masyarakat adat, pelaku wisata, serta pemerintah desa. Pendekatan yang berbasis musyawarah, kesetaraan, dan saling menghormati menjadikan budaya sebagai fondasi penting dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Peran organisasi budaya pun semakin diakui, tidak hanya sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai aktor pembangunan sosial, pendidikan, hingga ekonomi kreatif desa.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kalurahan Kemadang memberikan kepastian dan legitimasi bagi kelompok-kelompok seni untuk berkembang secara profesional, terstruktur, dan partisipatif. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata bahwa budaya bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi modal strategis untuk masa depan desa yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing.

### **Menuju Kalurahan Budaya yang Berdaya, Mandiri, dan Adaptif**

Penguatan organisasi budaya di Kalurahan Kemadang adalah bagian dari strategi besar membangun desa yang berkarakter. Budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan, tetapi sebagai modal sosial dan ekonomi yang dapat mendorong kemandirian masyarakat. Seni pertunjukan, tradisi lisan, ritual adat, dan ekspresi budaya lainnya disiapkan untuk menjadi bagian dari ekosistem desa wisata, pendidikan karakter, hingga diplomasi sosial. Disisi lain, upaya ini juga menjadi bentuk tanggung jawab intergenerasional, di mana generasi sekarang berkewajiban menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Pendidikan budaya yang inklusif, pelibatan anak muda dalam seni tradisi, dan adaptasi teknologi menjadi langkah strategis menuju budaya yang tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dalam kehidupan kontemporer.

Melalui pendekatan budaya, Kemadang merancang model pembangunan desa yang tidak bergantung sepenuhnya pada sektor wisata massal, tetapi juga berbasis pada potensi lokal. Seni pertunjukan, tradisi lisan, kuliner lokal, ritual adat, hingga produk kerajinan menjadi bagian dari ekosistem desa wisata berbasis budaya. Dengan

dukungan masyarakat, regulasi yang berpihak, serta kemitraan antar-lembaga, Kalurahan Kemadang menapaki jalan menuju masa depan sebagai kalurahan budaya yang tangguh, adaptif terhadap zaman, dan mampu memanfaatkan budaya sebagai kekuatan pembangunan lokal.

### **Pendidikan Budaya dan Regenerasi Pelaku Seni**

Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat, pelestarian budaya tradisional di Kalurahan Kemadang menghadapi tantangan yang tidak kecil salah satunya adalah regenerasi pelaku seni dan budaya. Arus globalisasi, perubahan gaya hidup, serta dominasi budaya populer modern telah menggeser minat sebagian generasi muda dari seni tradisi ke arah bentuk-bentuk hiburan yang lebih instan dan digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa warisan budaya yang selama ini dijaga dengan penuh dedikasi oleh generasi terdahulu dapat tergerus atau bahkan hilang jika tidak segera diwariskan secara sistematis dan adaptif.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kalurahan Kemadang mengambil langkah konkret dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif dalam penguatan organisasi budaya. Strategi ini dijalankan melalui berbagai inisiatif di tingkat padukuhan, di mana anak-anak dan remaja mulai aktif dilibatkan dalam pelatihan seni tradisional seperti tari klasik dan kreasi, karawitan, teater rakyat (seperti ketoprak dan wayang orang), serta musik tradisional khas desa seperti gejog lesung. Kegiatan-kegiatan ini tidak semata difungsikan sebagai hiburan, melainkan menjadi sarana pembelajaran lintas generasi yang dirancang untuk memperkuat keterikatan emosional dan spiritual generasi muda terhadap akar budaya mereka sendiri.

Langkah edukatif ini diperluas melalui kerja sama antara pemerintah kalurahan dan lembaga-lembaga pendidikan formal di wilayah Kemadang. Sekolah-sekolah lokal didorong untuk mengintegrasikan muatan lokal budaya ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Program semacam ini tidak hanya bertujuan mengajarkan keterampilan kesenian semata, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesopanan, dan penghormatan terhadap leluhur nilai-nilai yang menjadi landasan budaya masyarakat Kemadang. Sekolah menjadi mitra strategis dalam upaya ini, karena sistem pembelajaran yang terstruktur memungkinkan penanaman nilai-nilai tersebut sejak usia dini secara konsisten dan menyeluruh.

Kolaborasi ini memperkuat jembatan antara dunia pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, menciptakan kesinambungan dalam pembinaan generasi penerus budaya.

Namun, pelibatan generasi muda dalam kebudayaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pelestarian. Lebih dari itu, Kemadang melihat anak muda sebagai agen perubahan dan inovasi yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan bentuk-bentuk baru dari tradisi yang ada. Dengan memberikan ruang bagi kreativitas dan ekspresi, budaya lokal tidak hanya dilestarikan dalam bentuk aslinya, tetapi juga diperbarui dalam wajah yang lebih segar, tanpa kehilangan substansi nilai yang dikandungnya. Misalnya, ada inisiatif untuk menggubah tari-tari klasik menjadi koreografi yang lebih sesuai dengan selera generasi milenial, atau memadukan karawitan tradisional dengan unsur cerita kontemporer yang lebih mudah dicerna anak muda. Dalam konteks ini, budaya menjadi ruang dialog antar-generasi bukan sekadar warisan statis, tetapi medan hidup tempat ide-ide baru tumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut, penguatan organisasi budaya juga menysasar pada aspek kelembagaan. Pemerintah kalurahan mendorong setiap kelompok seni untuk memiliki struktur organisasi yang tertata, program kerja yang berkelanjutan, serta mekanisme regenerasi internal. Untuk mendukung hal tersebut, kalurahan menyediakan berbagai pelatihan dasar seperti manajemen organisasi budaya, pengelolaan event, literasi budaya, hingga pelatihan kepemimpinan untuk kader muda seni. Tujuannya adalah membangun organisasi budaya yang tidak hanya bergantung pada satu-dua tokoh senior, tetapi mampu mencetak pemimpin baru yang paham seni sekaligus memiliki kapasitas manajerial.

Dengan keterlibatan aktif generasi muda yang disertai pembinaan berkelanjutan dan sistematis, organisasi budaya di Kalurahan Kemadang tidak hanya akan terus hidup, tetapi juga akan tumbuh menjadi ruang-ruang kreativitas yang berdaya, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Regenerasi bukan hanya tentang menjaga tradisi agar tetap hidup, tetapi juga tentang mempersiapkan budaya untuk hidup di masa depan dalam bentuk yang relevan, bermakna, dan tetap berpijak kuat pada akar lokal.

## **Transformasi Digital dan Inovasi Budaya**

Kalurahan Kemadang menyadari pentingnya peran teknologi digital dalam memperluas jangkauan budaya di era modern. Namun, hingga saat ini, transformasi digital dalam bidang kebudayaan masih belum berjalan secara optimal. Belum banyak kelompok seni yang memiliki akses atau kemampuan untuk mendokumentasikan kegiatan mereka secara digital, apalagi mempublikasikannya melalui media sosial, platform video seperti YouTube, atau bekerja sama dengan konten kreator dan media lokal.

Minimnya literasi digital, keterbatasan fasilitas, serta belum adanya pendampingan teknis menjadi tantangan utama dalam proses digitalisasi budaya di Kemadang. Akibatnya, banyak ekspresi budaya yang hanya hidup dalam ruang lokal dan belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga memiliki risiko tinggi untuk terlupakan oleh generasi berikutnya atau tidak dikenal oleh masyarakat luar. Padahal, dokumentasi digital bukan hanya sebagai arsip, tetapi juga bisa menjadi strategi promosi dan diplomasi budaya yang efektif. Jika potensi ini dapat dikembangkan, maka budaya Kemadang memiliki peluang besar untuk dikenal lebih luas, membuka kerja sama lintas wilayah, dan memperkuat posisi desa dalam jejaring budaya digital regional maupun nasional.

# KEMANDIRIAN FINANSIAL KALURAHAN: OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rosaria Oktaviani, Erni Uli Sari, Sitha Elvia Agustina,  
Isak Pitherson A Weny

## Tanah Kas Desa

Tanah adalah aset berharga bagi suatu negara dan dapat digunakan untuk keperluan kesejahteraan serta kepentingan bersama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (26) menjelaskan bahwa Tanah Desa merujuk pada lahan yang dipegang atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk tujuan sosial.

Oleh karena itu, lahan desa tersebut dikelola dan digunakan demi kepentingan umum serta kemakmuran warga desa. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa, dinyatakan bahwa “Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial” (Ghalib & Yasin, 2023).

Tanah Kas Desa adalah aset berupa tanah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa demi kepentingan warga, baik sebagai sumber pendapatan, sarana pembangunan, maupun pelestarian kebudayaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan tanah ini tidak hanya terikat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mempertimbangkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta dalam pengaturan pemerintah, termasuk pengelolaan aset desa.

Pengaturan tanah desa di DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pasal 6 berbunyi bahwa jenis tanah desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa: adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelungguh: bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Pengarem-arem: bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang purna tugas; dan
- d. Tanah untuk kepentingan umum: tanah ini digunakan untuk kepentingan umum desa/Kalurahan, seperti jalan desa, pasar desa, lapangan olahraga dan lain-lain.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dalam Pasal 2 Tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, dilepaskan dengan tanah pengganti yang berada di lokasi tanah kas desa dalam satu desa yang sama atau desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan.



Gambar 7: interview mahasiswa tentang Kemandirian finansial kalurahan di Kalurahan Kemadang

Pemanfaatan tanah kas desa meliputi; sewa atau bangun serah guna dan atau bangun guna serah, yang dimana pemanfaatan tanah kas desa tersebut wajib mendapatkan izin dari gubernur. Setelah jangka waktu sewa tanah kas desa berakhir, pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kas desa yang disewa. Dalam hal tersebut terdapat bangunan-bangunan yang dibangun oleh pihak penyewa dan tanaman wajib pula diserahkan kepada pemerintah desa disertai dengan berita acara serah terima. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh instansi menjadi milik instansi yang bersangkutan dengan ketentuan; jangka waktu sewa tanah kas desa diperpanjang dan bangunan-bangunan tersebut masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi.

### **Pemanfaatan Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Parsons, pemberdayaan merupakan proses menekankan pada pengembangan tiga aspek fundamental dalam diri individu, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan. Ketika ketiga elemen tersebut terpenuhi, kapasitas individu akan meningkat secara signifikan, tidak hanya untuk memperbaiki kehidupan pribadi tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi orang-orang disekitar.

Sementara itu, menurut Ife pemberdayaan sebagai upaya holistic untuk membekali masyarakat dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan agar mereka mampu mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri, hal ini menekankan bahwa pemberdayaan sejatinya harus berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan mereka serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk kondisi sosial yang lebih baik (Perdana, 2019).

Sistem pengelolaan tanah adat Yogyakarta yang bersifat feodalistik selama ini cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai pengguna pasif tanpa hak pengelolaan penuh. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada partisipasi aktif dan kontrol warga atas sumber daya yang memengaruhi kehidupannya.

Di Kalurahan Kemadang secara praktik pengelolaan sudah menunjukkan adanya keterlibatan dari masyarakat untuk ikut serta mengelola tanah kas desa, bentuk keterlibatan yang terlihat adalah masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan ekonomi, baik pertanian maupun digunakan untuk warung atau took sembako. Lahan lahan strategis tanah kas desa yang dimiliki Kalurahan Kemadang terbuka untuk disewakan kepada masyarakat umum baik masyarakat yang ingin menggunakannya sebagai lahan untuk pertanian maupun lahan yang dapat digunakan untuk warung-warung.

Di tingkat praktis, pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola tanah secara produktif, misalnya melalui program sertifikasi tanah magersari atau pengembangan koperasi tani berbasis lahan adat. Langkah ini perlu didukung dengan pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi untuk memastikan proses berjalan secara partisipatif dan berkeadilan.

### **Konsep Ilmiah dalam Pemanfaatan Tanah Kas**

Ekonomi berkelanjutan adalah sebuah sistem ekonomi dimana jumlah orang dan jumlah barang yang dipertahankan pada beberapa tingkat konstan. Tingkat ini adalah berkelanjutan secara ekologis dari waktu ke waktu dan memenuhi setidaknya dasar kebutuhan semua anggota populasi (Effendi et al., 2024)

Di kalurahan kemadang, ekonomi berkelanjutan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi

produsen dan konsumen dengan tidak hanya menargetkan pada pertumbuhan ekonomi saja. Tujuan dari berkelanjutan merujuk pada pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup (Effendi et al., 2024)

<b>Pilar</b>	<b>Fokus Utama</b>
Ekonomi	Pertumbuhan yang efisien, inovasi, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sosial	Keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.
Lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam secara lestari, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan polusi serta emisi gas rumah kaca.

### **Tantangan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa**

Tanah kas desa (TKD) adalah aset milik desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. TKD dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan, hingga investasi. Namun dalam praktiknya, pengelolaan TKD menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek sumber daya dan manajemen kelembagaan.

#### **1. Masalah Sumber Daya dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa**

Masalah sumber daya dalam pengelolaan TKD terbagi ke dalam beberapa aspek penting:

##### **a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas**

Banyak aparatur desa belum memiliki kapasitas teknis maupun manajerial dalam mengelola aset desa, termasuk tanah kas. Minimnya pemahaman mengenai aspek hukum, tata ruang, pengelolaan investasi, hingga manajemen keuangan desa menjadi kendala utama. Kurangnya pelatihan khusus menyebabkan potensi TKD tidak dimanfaatkan secara optimal dan bahkan disalahgunakan.

##### **b. Sumber Daya Finansial**

Keterbatasan anggaran desa menghambat pengelolaan tanah kas desa secara produktif. Tidak ada alokasi khusus dalam APBDes untuk optimalisasi aset desa,

termasuk untuk pengukuran ulang, sertifikasi, atau investasi di lahan TKD. Hal ini menyebabkan TKD kerap hanya disewakan dengan nilai yang rendah dan tidak berkembang.

c. Data dan Informasi yang Tidak Akurat

Banyak desa tidak memiliki peta atau dokumen legalitas lengkap mengenai status tanah kas desa (misalnya sertifikat atau bukti kepemilikan). Ketidakjelasan batas-batas tanah dan status hukum menyebabkan konflik dengan pihak ketiga (baik warga, investor, maupun pemerintah kabupaten). Ketiadaan basis data digital juga membuat pemantauan dan perencanaan jangka panjang sulit dilakuka.

d. Keterbatasan Infrastruktur\*

Tanah kas desa pada kalurahan Kemadang, umumnya berada di lokasi yang belum memiliki akses infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai ekonomi tanah dan terbatasnya minat untuk pengelolaan produktif oleh pihak ketiga.

2. Solusi dan Strategi dalam Mengatasi Tantangan Pengelolaan TKD

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang bersifat sistematis dan kolaboratif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa strategi di antaranya adalah:

a. Peningkatan Kapasitas SDM Desa


Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa mengenai tata kelola aset, termasuk perencanaan penggunaan TKD. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau LSM lokal bisa dilakukan untuk edukasi tentang manajemen aset desa berbasis potensi lokal.

b. Sertifikasi dan Digitalisasi Aset

Tanah kas desa perlu segera disertifikasi untuk mendapatkan kepastian hukum. Data tanah harus dicatat dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi desa agar dapat dimonitor dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Peta digital partisipatif bisa melibatkan masyarakat dalam memastikan keakuratan dan transparansi pengelolaan lahan.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Desa dapat menggandeng BUMDes, koperasi, atau investor lokal untuk mengembangkan usaha produktif di atas TKD, seperti pertanian organik, ekowisata, atau pengelolaan energi terbarukan. Skema bagi hasil atau sewa



berbasis potensi ekonomi harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas dan menguntungkan semua pihak.

d. Alokasi Dana Khusus dalam APBDes

Pemerintah desa bisa mengalokasikan dana khusus untuk mendukung kegiatan seperti pemagaran tanah, pengukuran, atau pembangunan fasilitas penunjang. Dengan manajemen keuangan yang transparan, desa dapat mengubah TKD menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) yang signifikan.

e. Pengawasan dan Transparansi

Pengelolaan TKD harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dalam pengawasan. Informasi terkait status tanah, hasil sewa, dan rencana pemanfaatan harus diumumkan secara berkala dalam musyawarah desa atau melalui media informasi desa.

## **PENGUATAN REGULASI: REGULASI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**

Auny Vidiyan Imsawati, Andi Syamsul Muarib,  
Maria Regina Oyan, Elia Dacosta Baros



Gambar 8: interview mahasiswa tentang Penguatan regulasi di Kalurahan Kemadang

Kemadang adalah nama Desa yang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana letaknya pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Kemadang telah ditetapkan sebagai Kalurahan Mandiri Budaya dan

menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang masih tumbuh dan hidup di tengah masyarakat.

### **Fondasi Hukum dan Kebijakan di Tingkat Desa**

Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, Kemadang, Gunung Kidul, kehidupan masyarakatnya dipenuhi dengan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik keindahan alam dan kesederhanaan kehidupan sehari-hari, terdapat landasan hukum dan kebijakan yang menjadi pilar penting dalam pengelolaan sumber daya dan pengawasan di desa ini. Sejak lama, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Di Kemadang, peraturan-peraturan ini tidak hanya menjadi sekadar tulisan di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pengelolaan lahan pertanian, pemerintah desa bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kesuburan tanah agar tetap terjaga.

## **Sistem Pemantauan dan Evaluasi Regulasi Desa**

Dalam usaha untuk menciptakan pengelolaan desa yang baik dan berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi secara teratur sangatlah penting. Peraturan yang telah dibuat dan disetujui tidak serta-merta menjamin bahwa pelaksanaannya berhasil di lapangan. Diperlukan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta penilaian rutin untuk mengevaluasi efektivitas, dampak, dan relevansi dari peraturan tersebut. Tanpa adanya proses ini, kebijakan desa bisa menjadi tidak fleksibel, kurang mampu beradaptasi dengan perubahan, dan bahkan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, tindakan nyata yang harus diambil adalah mendirikan sebuah tim khusus di desa yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan aturan. Sebaiknya, tim ini terdiri dari anggota-anggota penting di desa seperti petugas desa, pemimpin masyarakat, wakil pemuda, dan kelompok perempuan, agar proses pemantauan dapat mencerminkan suara serta kebutuhan dari berbagai kalangan masyarakat. Tim ini tidak hanya akan mengawasi pelaksanaan teknis, tetapi juga bertindak sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, menyerap aspirasi, mengenali tantangan, serta memberikan saran perbaikan yang berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan adanya penyesuaian peraturan agar tetap kontekstual dan relevan. Dunia selalu berubah begitu juga dinamika di desa. Evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu desa untuk menghindari peraturan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan warga. Contohnya, peraturan tentang pengelolaan pariwisata bisa diperbaharui jika ada ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan ekonomi, atau jika kondisi lingkungan berubah yang memerlukan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya proses evaluasi yang jelas dan teratur, peraturan desa dapat berfungsi sebagai alat yang fleksibel tetapi tetap tegas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sehingga melaksanakan program edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa Kemadang dalam konteks regulasi desa adalah cara yang baik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keterlibatan aktif warga. Dengan menggunakan

berbagai cara seperti pertemuan warga, pelatihan, diskusi kelompok, dan media kreatif, masyarakat diperkenalkan dengan isi peraturan secara sederhana dan mudah dipahami dari hak mereka atas sumber daya desa, akses ke informasi publik, dan berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan. Metode yang melibatkan dialog dan partisipasi membantu menciptakan pemahaman bahwa peraturan bukanlah beban, tetapi merupakan alat bersama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Ketika masyarakat mengerti dan merasa memiliki peraturan yang ada, maka mereka akan secara alami dan terus menerus berpartisipasi dalam menjalankan dan mengawasinya.

Selain itu, adanya beberapa prestasi yang sudah menjadi icon Kalurahan Kemadang salah satunya adalah Desa Sadar Hukum, dengan berbagai kegiatan diantaranya melalui musyawarah padukuhan dan ditetapkan dalam surat keputusan resmi kalurahan, yang menjadi bukti keseriusan pemerintah desa dalam menjaga warisan leluhur. Menjadi ciri khas tersendiri Kalurahan Kemadang dengan berbagai keberagaman praktik budaya dan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Beberapa bentuk budaya tersebut antara lain upacara adat Bersih Desa, Sedekah Laut, Ruwatan, dan Jamasan, yang tidak hanya dilakukan secara simbolis, melainkan benar-benar melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai unsur.

### **Praktik Baik Penguatan Regulasi Kalurahan Kemadang**

Terkait dengan penguatan Regulasi di Kalurahan Kemadang dengan melakukan siklus dari pelaksanaan kegiatan di Desa ada beberapa bidang, yaitu melaksanakan kinerja pemerintahan atau vertikal secara reguler, dalam hal ini pemanfaatan tanah ataupun jenis pendapatan asli Desa di tetapkan dalam peraturan perorangan atau regulasi non reguler, yaitu seperti pemungutan Kalurahan yang artinya adalah sebagai dasar nilai sewa pada pengelolaan parkir yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang retribusi, sebagai contoh beberapa pantai Kukup, Baron, Krakal dan Sepanjang yang di sepanjang Kalurahan Kemadang, dengan pembagian pendapatan 40% untuk masyarakat setempat sekitar pantai dan 60% itu kembali kepada masyarakat khususnya untuk lansia dan operasional dan di dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan masyarakat, harapannya masyarakat bisa mandiri dengan kegiatan pelatihan capacity building dalam pembangunan kapasitas dan pelatihan skill atau keahlian seperti

pemadu wisat serta outbound, semua dikelola bersama. Dengan adanya Perdes (Peraturan Desa) juga menjadi peraturan perundang-undangan yang untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta mengatur hal-hal seperti tata kelola keuangan desa, tanah desa, adat istiadat, hak dan kewajiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, yang artinya dari dan untuk oleh masyarakat sehingga bermanfaat untuk warga masyarakat.

Dengan melakukan optimalisasi kegiatan reguler di bidang prestasi, Kalurahan Kemadang juga melakukan kegiatan musyawarah yang di dalamnya melibatkan seluruh kelompok baik dari lembaga masyarakat, forum anak dan tokoh agama yang harapannya untuk memberikan pemahaman atas hak pembangunan dalam mekanisme dan membentuk tim penyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan kegiatan dan anggraan serta dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang mencakup lima aspek, yang merupakan aspek utamanya adalah fokus pada perencanaan pembangunan, yaitu pada aspek sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dalam aspek ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, aspek infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, air bersih, dan teknologi informasi, aspek lingkungan hidup atau perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, aspek pada tata kelola pemerintahan dengan adanya reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan pelayanan publik. Pada kegiatan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yaitu forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menyelaraskan usulan masyarakat dengan program pemerintah dan menentukan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya, dan juga LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang merupakan wadah musyawarah di tingkat desa yang sebelumnya berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sebelum adanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran LMD digantikan secara resmi oleh BPD.

Kalurahan Kemadang secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai role mode Desa atau contoh Desa yang secara praktik baik dalam pengelolaannya berbasis budaya, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Model tata kelola yang terstruktur, legalitas yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor menjadikan Kalurahan Kemadang sebagai laboratorium lapangan yang relevan bagi mahasiswa dan akademisi untuk mengkaji implementasi kebijakan ilmu pemerintahan dalam konteks lokal. Dalam hal pengelolaan aset di Kalurahan Kemadang telah menjalankan mekanisme tata kelola tanah kas desa dengan cukup baik, mencakup inventarisasi, perjanjian sewa menyewa, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, penguatan Regulasi juga dilakukan melalui forum-forum musyawarah dan penyusunan dokumen perencanaan secara transparan. Tidak hanya di tingkat Desa saja Kalurahan Kemadang dalam melakukan penguatan Regulasi menjalin kerja sama melibatkan dengan Kejaksaan, dalam rangka kegiatan-kegiatan besar secara Nasional.


Tetapi Beberapa warga masih enggan untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan, mungkin karena kurangnya pemahaman atau rasa skeptis terhadap efektivitas kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan mengadakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan seminar, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta peran penting mereka dalam menjaga keberlanjutan desa. , dengan segala keindahan dan tantangannya, menjadi contoh nyata bagaimana landasan hukum dan kebijakan, serta peran pemerintah dalam pengawasan, dapat bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang diambil, ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap warga desa merasa terlibat dan bertanggung jawab atas lingkungan dan komunitas mereka. Dengan demikian, tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga rumah yang penuh dengan harapan dan kerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Peran pemerintah dalam pengawasan juga sangat penting dalam proses ini. Dengan adanya tim pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat, setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, di mana setiap

pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberhasilan program-program yang ada. Dalam konteks ini, pengawasan bukanlah sekadar kontrol, tetapi juga kolaborasi yang saling menguntungkan. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengimplementasikan kebijakan yang mendorong produktivitas pertanian, dengan beberapa Program sebagai berikut Pompanisasi untuk irigasi yang membantu petani mengatasi keterbatasan air penyediaan benih unggul yang tahan hama dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Program ini terlihat pada peningkatan hasil panen dan pendapatan petani, yang berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di desa.

Dalam pengawasan di peran pemerintah dalam sangatlah vital. Setiap tahun, diadakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam forum ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait kebijakan yang ada. Suara masyarakat menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Di tengah suasana musyawarah, terlihat seorang kepala desa yang bijaksana, mendengarkan setiap masukan dengan seksama. Ia memahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ketat, tetapi juga oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat. Dalam setiap keputusan yang diambil, ia selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa memiliki andil dalam setiap langkah yang diambil.

Penguatan Sektor Pariwisata melalui Pokdarwis, Kemadang memiliki potensi wisata pantai yang indah. Pemerintah mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengelola objek wisata secara mandiri. Upaya Pokdarwis: pengelolaan fasilitas wisata yang ramah lingkungan, pelatihan keterampilan pelayanan wisata, promosi wisata melalui media sosial, pengembangan produk wisata lokal. Dengan penguatan sektor pariwisata, masyarakat Kemadang merasakan manfaat ekonomi langsung, meningkatkan pendapatan dari sektor jasa dan usaha kreatif. Pendataan dan Perencanaan Berbasis Data, Desa Kemadang mengadopsi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya untuk mengelola data secara mandiri. Integrasi data dengan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) memungkinkan perencanaan



pembangunan yang lebih tepat sasaran. Manfaat Pendekatan Berbasis Data: Kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Desa Kemadang telah berhasil mengubah tantangan menjadi peluang melalui regulasi dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, desa ini menjadi contoh sukses bagaimana regulasi dan teknologi informasi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur. Kemadang kini berdiri teguh, siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Masyarakat yang dulunya ragu kini semakin percaya diri untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, mereka merasa memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Kesejahteraan yang diimpikan bukan lagi sekadar angan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat diraih bersama. Dalam perjalanan ini, telah menyusun arah yang jelas: dari regulasi menuju sejahtera. Dengan semangat gotong royong dan komitmen untuk saling mendukung, desa ini menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain. Di tengah tantangan dan perubahan zaman, tetap teguh melangkah, mengukir cerita tentang bagaimana regulasi dan kebijakan dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Di sinilah, di antara pepohonan dan ladang yang subur, harapan akan masa depan yang lebih baik terus tumbuh dan berkembang.

# **KESEJAHTERAAN GOTONG-ROYONG: KOLABORASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PESISIR**

Victorianus Oce, Yohanes Dasifa, Pancar Setia Budi

Kalurahan kemadang merupakan sala satu daerah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalurahan kemadang dikenal memiliki bentang alam yang unik dan garis pantai selatan yang indah, menjadikannya salah satu destinasi wisata pesisir yang berkembang pesat. Potensi wisata alam, budaya, serta keunikan lokal lainnya menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalurahan Kemadang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, khususnya semangat gotong royong, yang secara historis menjadi pengikat sosial dan modal utama dalam pembangunan berbasis komunitas. Nilai ini jika diberdayakan secara maksimal, dapat menjadi landasan kuat dalam membangun kawasan wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Semangat gotong royong merupakan salah satu nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Kalurahan Kemadang. Nilai ini tidak hanya mencerminkan solidaritas antarwarga, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari modal sosial yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Menurut Putnam (2000), modal sosial mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Dalam konteks ini, gotong royong menjadi elemen penting dalam memperkuat jaringan sosial dan membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Pengembangan kawasan wisata pesisir yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat lokal. Gotong royong menjadi nilai yang memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama antar warga masyarakat kalurahan kemadang. Melalui semangat gotong royong, masyarakat secara bersama-sama membangun dan mengelola fasilitas wisata seperti jalur akses, kebersihan pantai, tempat parkir, warung, dan penataan spot wisata. dalam penelitian oleh Kurniawan et al. (2021), menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata

pesisir melalui aktivitas gotong royong dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan efektivitas konservasi sumber daya pesisir. Gotong royong tidak hanya memperkuat jaringan sosial tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan. praktek



Gambar 9: interview mahasiswa tentang kolaborasi gotong royong di Kalurahan Kemadang

gotong royong dalam pengelolaan wisata pesisir berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, sehingga menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya lokal seperti gotong royong dalam model pengembangan wisata pesisir berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang pengelolaan kawasan tersebut. (Wijayanti & Sari, 2023)

### **Kolaborasi Antara Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan**

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah kalurahan menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan pesisir. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pembagian peran yang adil, penyesuaian kepentingan, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Pemerintah bisa memfasilitasi regulasi dan infrastruktur dasar; pelaku usaha dapat mendukung promosi dan investasi; sedangkan masyarakat tetap menjadi pengelola utama dengan menjaga nilai-nilai lokal dan lingkungan.

Pengembangan kawasan wisata pesisir kalurahan kemadang kabupaten gunungkidul tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat lokal. sebagaimana yang di sampaikan oleh pak Nur Wahidin mengatakan bahwa munculnya destinasi wisata di Gunungkidul, khususnya di kawasan pesisir, bukanlah hasil dari program pemerintah. cikal bakal wisata di daerah ini lahir dari semangat kolektif masyarakat itu sendiri. seperti partisipasi warga dalam semangat gotong royong, yang kemudian membentuk kolaborasi menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata di kalurahan kemadang. Pada awalnya masyarakat yang melihat potensi dari alam sekitarnya, Mereka kemudian berinisiatif membuka akses jalan bahkan sebelum ada

perhatian dari pemerintah. Proses pembukaan jalan bukanlah hal mudah. Hal ini dilakukan secara swadaya masyarakat menghibahkan tanahnya, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu, demi menciptakan akses menuju pantaipantai yang kini menjadi daya tarik wisata. Bisa dikatakan, hampir seluruh objek wisata yang kini ramai dikunjungi dan semuanya itu tentu berawal dari langkah kecil masyarakat setempat malalui partisipasi aktif dan gotong royong.

Kolaborasi antarwarga, tokoh masyarakat, pemuda, dan pelaku lokal menjadi kunci. Hal ini menjadi kekuatan sejati dari wisata Gunungkkidul, bukan sekadar panorama alamnya yang memukau, tetapi juga semangat dan perjuangan kolektif yang melahirkan tempattempat itu. Perlu digarisbawahi bahwa awal mula munculnya objekobjek wisata, khususnya di wilayah pesisir Gunungkkidul, bukanlah hasil dari program atau arahan langsung dari pemerintah. Bukan pemerintah yang datang lalu mengatakan, Mari kita buka pantai ini, kita buat jalan. Bukan seperti itu. justru, inisiatif itu lahir dari bawah dari masyarakat sendiri. Warga setempatlah yang pertama kali melihat adanya potensi besar di balik keindahan pantai yang selama ini belum terjangkau. Lalu muncullah gerakan bersama, gotong royong yang benarbenar hidup. Warga bahumembahu membuka akses jalan dengan sistem giliran: hari ini padukuhan A, besok padukuhan B, lusa padukuhan C, dan seterusnya.

Dengan cara seperti itulah jalan mulai terbuka. Masyarakat tidak hanya menyumbangkan tenaga, tapi juga menghibahkan tanahnya untuk kepentingan bersama. Di sinilah terlihat bahwa untuk memulai gerakan seperti ini memang dibutuhkan tokoh tokoh pelopor: bisa dari masyarakat, dari kalurahan, atau dari para dukuh. Kadang muncul dari inisiatif murni warga misalnya seseorang berkata, Pak, saya siap membuka jalan, tanah saya bisa dipakai. Pemerintah kalurahan dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, bukan inisiator utama. Biasanya kalurahan membantu mengoordinasikan lewat para dukuh. Ketika para dukuh, tokoh masyarakat, dan kalurahan bersuara dan menyampaikan maksudnya dengan jelas, masyarakat yang semula ragu pun akhirnya bisa menerima. Meski tidak 100% semua langsung setuju, biasanya melalui pendekatan personal dan pemahaman bersama, hambatanhambatan bisa diatasi.

Memang ada juga satudua pihak yang bersikeras menolak, karena persoalan batas, lahan, atau pandangan pribadi. Namun itu pun bisa disiasati lewat musyawarah.

Kadang jalur bisa dialihkan, atau dalam kasus tertentu disepakati bentuk ganti rugi antarwarga secara swadaya, atau diberikan bentuk keringanan tertentu dalam bentuk gotong royong. Yang paling penting untuk dicatat adalah semua ini lahir dari semangat masyarakat sendiri. Kalau sekarang ada program-program pemerintah seperti Jalan Usaha Tani, itu baru datang belakangan.

Peran kelompok masyarakat pengawas dalam menjaga pantai kita di wilayah pesisir sini, setiap titik pantai sudah memiliki kelompok masyarakat pengawas yang dikenal dengan sebutan Pokmaswas atau yang akrab disebut juga Maswas oleh warga. Mereka inilah garda terdepan dalam menjaga kawasan pesisir dari berbagai potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan. Pokmaswas dibentuk sebagai respon atas berbagai permasalahan yang sempat marak di masa lalu mulai dari pencurian pasir, pengambilan terumbu karang, hingga praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan potasium. Hal-hal tersebut sangat merugikan lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya laut kita.

Dengan adanya kelompok pengawas ini, masyarakat ikut aktif memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah pantai. Peran Pokmaswas tidak tergantikan, karena mereka yang paling dekat dengan situasi lapangan sehari-hari. Pernah, di masa lalu, terjadi kasus serius seperti pengeboman ikan dan perusakan karang yang bahkan sampai menimbulkan proses hukum. Namun sekarang, berkat kesadaran masyarakat dan peran aktif Pokmaswas, situasi jauh lebih kondusif. Masyarakat bukan lagi penonton, tapi penjaga lingkungan mereka sendiri.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Bentuk kolaborasi ini terwujud dalam berbagai upaya yang saling mendukung untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya ke kawasan pantai dan Gunungkidul. Pemerintah daerah, baik di tingkat kalurahan maupun kabupaten, memiliki peran masing-masing. Pemerintah kalurahan lebih fokus pada program-program teknis yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pelatihan, pengelolaan sampah, atau peningkatan kapasitas pelaku wisata lokal. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan dalam promosi dan penyelenggaraan berbagai event untuk menarik wisatawan dari luar daerah. Mereka aktif mengadakan kegiatan dan kampanye promosi yang bertujuan agar kawasan pantai semakin ramai dikunjungi. Dampaknya sudah mulai terasa. Semakin banyak

kunjungan wisata berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan warga pun ikut terangkat. Kini, banyak anak muda di Kalurahan Pamadang yang memilih tetap tinggal dan berkarya di daerah sendiri. Mereka tidak lagi merantau seperti generasi sebelumnya. Setelah lulus sekolah, mereka terlibat langsung dalam sektor wisata mulai dari jasa fotografi, berjualan makanan dan minuman, hingga membuka usaha kecil lainnya di sekitar kawasan pantai.

Bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan peran yang saling melengkapi, pembangunan wisata tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Sebagian besar masyarakat yang menjadi pelaku wisata di kawasan pantai tersebut menempati tanah milik Keraton, yang dikenal sebagai tanah Sultan Ground (Sultanbrun) atau tanah SK. Tanah ini secara administratif berada di bawah kewenangan Keraton, bukan pemerintah kalurahan. Oleh karena itu, pengurusan atau pengelolaan lahan tersebut juga menjadi tanggung jawab pihak Keraton. Namun dalam praktiknya, masyarakat telah menempati dan mengelola tanah SK ini secara turuntemurun. Di daerah ini dikenal istilah babat alas, yaitu mereka yang pertama kali membuka dan mengelola wilayah tersebut—biasanya para leluhur atau simbah dari warga yang tinggal sekarang. Meskipun status tanahnya adalah tanah Sultan, masyarakat merasa memiliki hubungan historis dan sosial yang kuat dengan tanah itu karena telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain menempati tanah Sultan, ada pula masyarakat yang memiliki tanah pribadi, termasuk yang berada di pinggir pantai. Beberapa warga juga mengelola lahan berdasarkan sistem sewa atau kontrak dari pemilik tanah. Hal ini menjadi urusan langsung antara pemilik tanah dan penyewa. Di sisi lain, banyak pelaku wisata yang tidak memerlukan tempat tetap untuk menjalankan usahanya. Contohnya, penyedia jasa foto wisata, pengemudi jeep wisata, pedagang asongan, atau penjual keliling oleholeh seperti udang, jengking laut, kerajinan dari kerang, hingga buahbuahan. Mereka beroperasi secara mobile dan tidak memerlukan lahan khusus untuk berjualan. Melihat perkembangan jumlah pelaku usaha yang terus bertambah, terutama di awal pembukaan kawasan wisata, muncul kebutuhan untuk melakukan penataan. Oleh karena itu, pengelola local dalam hal ini Ketua Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis membuat kebijakan untuk mengatur para pelaku usaha dengan

menerbitkan kartu anggota. Hanya mereka yang memiliki kartu anggota yang diperbolehkan berjualan di area tersebut, guna menjaga ketertiban dan menghindari kepadatan berlebihan. Para pemilik tanah dan pelaku wisata yang sudah lebih dahulu beraktivitas di kawasan ini diberikan prioritas. Sementara itu, POKDARWIS juga membantu membatasi jumlah pelaku usaha yang masuk agar kawasan wisata tetap tertib, nyaman, dan tidak terlalu padat oleh pedagang dadakan.

### **Tantangan Pengelolaan Wisata**

Tantangan terbesar dalam pengelolaan kawasan wisata saat ini bukan hanya pada aspek fisik atau infrastruktur, tetapi justru pada pengondisian manusianya yakni bagaimana menata perilaku pelaku usaha dan pedagang agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seringkali, terdapat pelaku usaha yang cenderung mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang merugikan kelangsungan wisata itu sendiri. Misalnya, ada pedagang yang tidak mematuhi aturan standarisasi harga sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari wisatawan. Halhal seperti ini justru merusak citra destinasi wisata secara keseluruhan. Mengatur ribuan pedagang dan pelaku wisata dengan latar belakang serta kepentingan yang berbedabeda tentu menjadi tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) menjadi sangat penting sebagai wadah untuk pengorganisasian dan pengawasan. Kelompok ini tidak hanya berfungsi untuk membina, tetapi juga membantu menegakkan aturan di lapangan melalui pendekatan sosial yang lebih efektif. Kini, sistem pengelolaan menjadi lebih terstruktur. Jika sebelumnya Surat Keputusan (SK) operasional para pelaku wisata dikeluarkan oleh pihak kalurahan, sekarang dikeluarkan langsung oleh pemerintah provinsi atau gubernur. Hal ini menunjukkan peningkatan legitimasi dan kontrol yang lebih kuat terhadap pengelolaan kawasan wisata. Setiap pantai kini telah ditentukan titiktitik pengelolaannya. Di tingkat kalurahan, hanya ada satu kelompok besar POKDARWIS, sementara wilayah pantai dikelola melalui subsub kelompok di bawahnya. Mekanisme ini memungkinkan pengawasan yang lebih spesifik dan dekat dengan para pelaku usaha. Menariknya, dalam praktiknya, penegakan aturan sering kali dilakukan oleh anggota kelompok itu sendiri. Jika ada pedagang atau pelaku wisata yang melanggar aturan atau bersikap tidak kooperatif, temantemannya sesama anggota kelompok

biasanya akan mengambil peran untuk menegur dan menertibkan. Pendekatan sosial semacam ini dinilai lebih efektif karena berbasis rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelangsungan kawasan wisata.

### **Kesejahteraan Gotong Royong dalam Kolaborasi Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir**

Gunungkidul dikenal sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis kering dan berbatu karst, menjadikannya daerah yang dulunya dianggap kurang potensial untuk pembangunan ekonomi, apalagi pariwisata. Minimnya akses jalan dan infrastruktur membuat keindahan alamnya tidak terjamah. Kemunculan destinasi wisata di Gunungkidul, khususnya di kawasan pesisir, merupakan bukanlah hasil program pemerintah, melainkan buah dari inisiatif dan semangat kolektif masyarakat lokal. Dengan gotong royong serta kolaborasi antarwarga masyarakat, dan pelaku lokal. Proses ini menunjukkan penerapan teori pembangunan berbasis masyarakat (*communitybased development*) yang menekankan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sekaligus memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial warga terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi daerah mereka, pendekatan ini tidak hanya menciptakan destinasi wisata yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan yang kuat terhadap sumber daya dan hasil pembangunan.(Bhandari, 2020).

Kolaborasi antarwarga masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam mengatasi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses dan konflik lahan. seperti pembukaan jalan menuju pantai dilakukan secara bergiliran oleh warga dari berbagai padukuhan, serta adanya musyawarah untuk menyelesaikan masalah lahan secara damai. Dengan modal sosial yang kuat, masyarakat mampu menjaga keberlanjutan objek wisata sekaligus memelihara lingkungan melalui pembentukan kelompok pengawas pantai (Pokmaswas). Hal ini menjadikan pariwisata Gunungkkidul bukan hanya sekadar potensi alam, tetapi juga wujud nyata kekuatan sosial yang memperkuat pembangunan lokal secara inklusif dan berkelanjutan (Nguyen et al., 2021).

a. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Gunungkidul

Pengembangan destinasi wisata di Gunungkidul, khususnya di kawasan pesisir, tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat lokal sebagai pelopor utama. Hal ini diperkuat oleh temuan Nurhayati & Supriyanto (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan wisata pesisir Gunungkidul bertumpu pada partisipasi warga lokal dalam membuka dan mengelola destinasi, sebelum hadirnya program pemerintah yang lebih formal.

b. Inisiatif dari masyarakat

Inisiatif awal untuk membuka kawasan pesisir menjadi destinasi wisata berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah. Prosesnya tidak didorong oleh program formal dari pemerintah kalurahan kemadang, melainkan muncul dari kesadaran warga masyarakat akan potensi keindahan alam yang ada di sekitarnya. Masyarakat melihat peluang pariwisata sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mereka pun mulai bertindak secara mandiri.

Langka pertama yang dilakukan adalah masyarakat secara swadaya, membuka jalan menuju pantai serta menghibakan tanah pribadi untuk jalan umum, pengerjaan akses secara manual dengan tenaga warga secara bergilir, hingga koordinasi antar tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan dengan prinsip gotong royong, di mana setiap padukuhan menyumbang tenaga, lahan, dan waktu secara bergiliran.

Inisiatif dan kerja sama menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Gunungkidul merupakan hasil dari gerakan masyarakat yang kuat, bukan semata hasil kebijakan dari pemerintah kalurahan. Inilah yang membuat kawasan wisata di Gunungkidul memiliki identitas sosial yang kuat, karena dibangun oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

c. Gotong royong sebagai fondasi utama

Dalam pengembangan wisata di kalurahan kemadang kabupaten gunungkidul, peran pemerintah kalurahan tidak bersifat dominan sebagai pengarah utama, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong inisiatif dan gerakan masyarakat. Semangat gotong royong menjadi landasan utama dalam proses pembangunan wisata. Warga tidak hanya menyumbangkan tenaga secara sukarela, tetapi juga menghibahkan tanah pribadi demi kepentingan bersama. Setiap padukuhan secara

bergiliran memberikan kontribusi tenaga, waktu, dan sumber daya, sehingga pembangunan berjalan secara kolektif dan berkelanjutan.

Sistem giliran ini tidak hanya memudahkan pembagian beban kerja, tetapi juga mempererat solidaritas antarwarga dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Dengan cara ini, masyarakat merasa bertanggung jawab secara langsung atas keberhasilan dan kelestarian destinasi yang dibangun bersama. Pendekatan partisipatif seperti ini menjadi kekuatan utama yang membedakan pengembangan wisata di Gunungkidul dari daerah lain, karena inisiatif dan kepedulian masyarakat menjadi pendorong utama kemajuan sektor pariwisata lokal. Pola kerja ini mencerminkan semangat gotong royong yang masih hidup dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas wisata secara swadaya.

d. Melibatkan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam memotivasi partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan wisata. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, sekaligus fasilitator yang membantu menyelesaikan persoalan sosial yang muncul, seperti konflik batas tanah atau pembagian manfaat dari pengelolaan wisata. Peran aktif tokoh masyarakat ini sangat vital untuk menjaga keharmonisan dan memastikan setiap langkah pembangunan berjalan dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

Tokoh masyarakat, tidak hanya berperan sebagai pemimpin lokal, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan semangat kolektif warga. Mereka sering menjadi pelopor dalam inisiatif pembukaan akses jalan menuju destinasi wisata dan mengorganisasi kegiatan gotong royong yang melibatkan berbagai padukuhan secara bergilir. tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik terkait batas lahan atau pembagian hasil wisata, sehingga menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberlanjutan pengembangan wisata. Dengan kedekatan sosial dan pengaruhnya, mereka mampu membangun kepercayaan antar warga masyarakat serta memperkuat solidaritas masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya wisata secara bersamasama.

e. Pengelolaan wisata

Masyarakat setempat berperan langsung sebagai pengelola awal fasilitas wisata dengan menyediakan berbagai kebutuhan seperti tempat parkir, warung makan, dan penataan area wisata secara mandiri. Semua kegiatan ini dilakukan berdasarkan swadaya (usaha sendiri tanpa bantuan besar dari luar) dan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan yang sudah ada dalam budaya masyarakat setempat.

Masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengembangkan fasilitas wisata dengan cara yang sesuai dan menghargai budaya lokal mereka. Pendekatan ini bisa meningkatkan keberlanjutan wisata dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

f. Pengelolaan Wisata Berbasis Kolaborasi

Keberhasilan pengembangan wisata di Kalurahan Kemadang kabupaten Gunungkidul tidak hanya bersumber dari kekayaan alamnya, tetapi juga dari kekuatan kolaborasi antara berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah kalurahan. Gotong royong menjadi nilai dasar yang terus hidup dalam kehidupan sosial masyarakat dan diterjemahkan ke dalam praktik pembangunan yang nyata. bentuk kolaborasi yang paling menonjol terlihat pada proses pembukaan akses menuju destinasi wisata. Masyarakat menerapkan sistem giliran antarpadukuhan, di mana setiap padukuhan secara bergantian menyumbangkan tenaga, waktu, dan sumber daya. Mereka bahu membahu membuka jalan menuju pantai yang dahulu terisolasi. Banyak warga bahkan secara sukarela menghibahkan sebagian tanahnya demi kepentingan bersama.

Pemerintah Kalurahan Kemadang memainkan peran sebagai fasilitator, bukan pengarah utama. Kalurahan membantu mengoordinasikan kegiatan lintas padukuhan melalui para dukuh, memfasilitasi musyawarah saat ada konflik terkait batas lahan, serta memberikan dukungan administratif dalam bentuk surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya. Pemerintah Kalurahan Kemadang juga berperan dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang harmonis di antara warga masyarakat. Hubungan antara pemerintah kalurahan kemadang dan masyarakat ini mencerminkan kemitraan berbasis kepercayaan dan partisipasi aktif. Ketika tokoh masyarakat, dukuh, dan kalurahan menyampaikan maksud

pembangunan secara terbuka dan persuasif, warga yang semula ragu pun akhirnya bersedia mendukung. Bahkan dalam kasus-kasus sulit, pendekatan musyawarah dan solidaritas sosial mampu menyelesaikan perbedaan tanpa harus melibatkan pihak luar.

Masyarakat memegang peran sentral sebagai penggerak utama dalam pengembangan wisata di Kalurahan Kemadang kabupaten Gunungkidul. Dengan kesediaan menghibahkan tanah untuk kepentingan akses bersama, warga menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan bersama. Semangat gotong royong yang terjalin melalui sistem kerja bergiliran antar padukuhan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur wisata. Selain itu, masyarakat juga bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan, mulai dari pembukaan akses jalan hingga pengelolaan fasilitas wisata, sehingga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan destinasi wisata secara nyata dan berkelanjutan.

g. Tantangan Pengelolaan Wisata dan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

a) Tantangan Pengelolaan Wisata

Pengelolaan destinasi wisata di kalurahan kemadang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, Dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada aspek fisik seperti infrastruktur atau aksesibilitas, tetapi justru pada aspek pengelolaan perilaku manusia. Salah satu masalah krusial adalah bagaimana mengondisikan pelaku usaha dan pedagang agar mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Seringkali, terjadi pelanggaran terhadap standarisasi harga, tata letak kios, atau ketentuan operasional, yang berujung pada keresahan wisatawan dan rusaknya citra destinasi wisata.

Fenomena ini muncul karena kepentingan ekonomi yang berbedabeda, di mana sebagian pelaku usaha lebih fokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelangsungan kawasan wisata. Dalam konteks ini, mengatur ribuan pelaku wisata yang berasal dari berbagai latar belakang sosial menjadi tantangan yang tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan birokratis formal.

b) Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

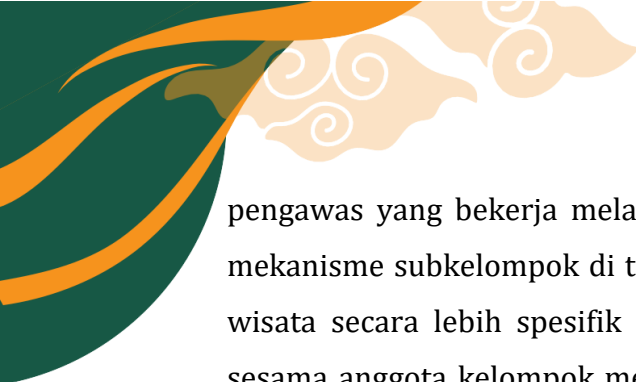
Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi sangat penting

sebagai wadah pengorganisasian dan pengawasan sosial. Peran kelompok Pokdarwis tidak hanya berfungsi untuk membina dan memberdayakan pelaku wisata, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan melalui pendekatan yang berbasis kedekatan sosial dan budaya. Dalam praktiknya, anggota Pokdarwis sering kali yang pertama kali memberikan teguran terhadap pelanggaran, bukan sebagai bentuk sanksi formal, melainkan sebagai bagian dari rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Pokdarwis dibentuk sebagai satu organisasi utama, dengan subdivisi atau subkelompok yang secara khusus menangani pengelolaan kawasan pantai atau titik wisata tertentu. Mekanisme seperti ini memungkinkan pengawasan yang lebih spesifik, dekat, dan kontekstual, karena dilakukan oleh orang-orang yang memahami dinamika lokal. Dengan pendekatan ini, penegakan aturan terasa lebih manusiawi, dan pada saat yang sama, lebih efektif karena berbasis solidaritas sosial dan norma kolektif.

Keberhasilan pengembangan wisata di Kalurahan Kumandang, Kabupaten Gunungkidul, merupakan hasil nyata dari kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah kalurahan. Bukan semata karena potensi alam yang dimiliki, tetapi karena kuatnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas yang hidup dalam komunitas. Inisiatif masyarakat untuk membuka akses menuju kawasan wisata melalui sistem giliran antarpadukuhan, hingga kesediaan menghibahkan tanah demi kepentingan bersama, menjadi bukti kuat bahwa pembangunan di wilayah ini berakar dari partisipasi aktif warga.

Peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator yang mendukung kegiatan masyarakat melalui koordinasi dan pendampingan administratif, bukan sebagai pengarah utama, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat bersifat kemitraan berlandaskan kepercayaan, komunikasi terbuka, dan musyawarah. Model partisipatif ini memungkinkan setiap tantangan di lapangan diselesaikan secara damai dan inklusif, menjadikan Kalurahan Kumandang sebagai contoh nyata pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh.

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi sangat vital. Pokdarwis tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga berperan sebagai



pengawas yang bekerja melalui pendekatan kultural dan kedekatan sosial. Melalui mekanisme subkelompok di tiap titik wisata, Pokdarwis mampu menjangkau pelaku wisata secara lebih spesifik dan personal. Penegakan aturan yang dilakukan oleh sesama anggota kelompok menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, Pokdarwis menjadi ujung tombak dalam menciptakan tata kelola wisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pengembangan pariwisata di Kalurahan Kumandang, kabupaten Gunungkidul tidak hanya bertumpu pada keindahan alam, tetapi menjadi wujud dari kekuatan sosial masyarakat lokal yang berhasil mendorong pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat pada kearifan lokal.

## KESIMPULAN

Perjalanan Kalurahan Kemadang dari masa lalu hingga kini menggambarkan transformasi yang luar biasa dari sebuah desa yang mampu menemukan jati dirinya dan membangun kemandirian melalui pendekatan holistik. Buku ini membuktikan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Beberapa aspek sebagai faktor pendorong terwujudnya kemandirian desa di Kalurahan Kemadang adalah sebagai berikut:

1. Fondasi historis Kalurahan Kemadang memberikan pembelajaran berharga bahwa identitas dan nilai-nilai luhur nenek moyang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Akar sejarah yang kuat ini kemudian menjadi landasan solid untuk membangun masa depan yang lebih baik.
2. Revolusi cara pandang terhadap pendidikan telah membuka cakrawala baru bagi warga Kemadang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan globalisasi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal.
3. Komitmen kalurahan dalam perlindungan sosial, khususnya terhadap perempuan dan anak, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kelompok rentan. Upaya ini bukan sekadar program, melainkan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat.
4. Transformasi sektor ekonomi melalui penguatan UMKM memperlihatkan bagaimana kolaborasi dan inovasi komunitas mampu menggerakkan roda perekonomian lokal. Dinamika ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
5. Revitalisasi budaya melalui penguatan organisasi budaya membuktikan bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan identitas budaya. Sebaliknya, warisan budaya yang dikelola dengan baik justru menjadi aset berharga untuk pembangunan dan daya tarik wisata.
6. Kemandirian finansial melalui optimalisasi tanah kas desa menunjukkan kearifan dalam mengelola aset publik untuk kesejahteraan bersama. Langkah ini

membuktikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan.

7. Penguatan regulasi mencerminkan keseriusan Kalurahan dalam menciptakan tata kelola yang baik. Regulasi yang disusun dengan partisipasi masyarakat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan bersama.
8. Pengembangan kawasan wisata pesisir melalui semangat gotong-royong menggambarkan kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat Kemadang. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Keseluruhan narasi dalam buku ini menunjukkan bahwa kemandirian desa bukanlah hasil dari satu momen, melainkan proses panjang yang memerlukan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi dari **seluruh** elemen masyarakat. Kalurahan Kemadang telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang visioner, partisipasi masyarakat yang aktif, dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, sebuah desa dapat mencapai kemandirian yang sesungguhnya.

Model pembangunan Kalurahan Kemadang layak menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Pengalaman mereka membuktikan bahwa pembangunan dari bawah dengan berbasis pada potensi lokal, nilai-nilai budaya, dan partisipasi masyarakat adalah kunci menuju kemandirian yang berkelanjutan. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai luhur, Kalurahan Kemadang telah menunjukkan jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. (2023). Eksistensi tanah Sultan Ground dalam hukum tanah nasional. *Jurnal Hukum*, 4(1), 88–100.
- Anugrah, A., Nurlaely, R., Arbi, M. F., Alfaritsy, M. S., & Karina, N. (2023). Pengembangan sosial dan pelestarian budaya masyarakat di Desa Cibenda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(3), 214–222. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i3.230>
- Bhandari, B. (2020). Community-based development in Nepal: A systematic review of literature. *Journal of Rural Studies*, 76, 211–222.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Harvard University Press.
- Cahyana, I. N. (2019). Kebijakan pemanfaatan tanah kas desa (TKD) dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah desa Sukasari Kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5550>
- Dali, Z. (2016). Hubungan antara manusia, masyarakat, dan budaya dalam perspektif Islam. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 9(1), 47–57. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v9i1.373>
- Dinas Sosial Gunungkidul. (2024a). Penjangkauan kasus kekerasan seksual. Diakses dari <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/2024/08/06/penjangkauan-kasus-kekerasan-seksual/>
- Dinas Sosial Gunungkidul. (2024b). Monitoring kelompok masyarakat (POKMAS) bantuan sosial permakanan APBD Tahun 2024. Diakses dari <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/berita-1042/>
- Dinas Sosial Gunungkidul. (2024c). Penyerahan bantuan sosial permakanan APBD Tahun 2024 bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Diakses dari <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/berita-1041/>
- Dinas Sosial Gunungkidul. (n.d.). Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diakses dari <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/category/bidang-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/>
- DP3AP2 Provinsi DIY. (n.d.). Pelatihan Bina Keluarga Sejahtera Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul. Diakses dari <http://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/685-pelatihan-bina-keluarga-sejahtera-tahun-2022-di-kabupaten-gunungkidul>

- Effendi, D., Saputra, W., & Yanti, N. (2024). Ekonomi berkelanjutan: Kunci ketahanan pangan dan kemajuan Indonesia emas di IKN. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 181–190. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.448>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Urgensi pendidikan nilai di era globalisasi. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 7(1), 64–70. <https://doi.org/10.37598/pjpp.v7i1.597>
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*.
- Ghalib, A., & Yasin, B. (2023). Tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 5(2), 1–16.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Hart, R. A. (1992). *Children's participation: From tokenism to citizenship*. UNICEF.
- Hurlock, E. B. (2005). *Psikologi perkembangan anak*. Erlangga.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). *Pedoman pembentukan forum anak*.
- Maryam, J. S., & Adrianis, M. (2021). Strategi pemerintah desa dalam mengelola sawah tanah kas desa di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 52–61. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i1.28>
- Nguyen, V. H., Tran, T. D., & Bui, T. T. (2021). The role of social capital in sustainable community-based tourism development: Evidence from rural Vietnam. *Sustainability*, 13(4), 2203.
- Ohoiwutun, Y. A. T., et al. (2024). Konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah kas desa: Tinjauan hukum terhadap penebangan tanaman di Desa Pace, Kabupaten Jember. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 1–9.
- Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. (2023). Rahman, A. Urgensi pendidikan formal bagi masyarakat Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. 2(1), 266–277. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/128/127>
- Pemerintah Kalurahan Kemadang. (2024). *Sinerat Lampahing Bumi Kemadang*. Kalurahan Kemadang.
- PPID Pemkab Gunungkidul. (n.d.). Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan jejaring FPKK di Kapanewon Tanjungsari. Diakses dari <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/1847>
- Putra, I. G. N. A., & Dewi, P. M. (2021). The role of local communities in coastal tourism development: Evidence from Gunungkidul Regency.

- Rahmawati, S. (2018). Implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(4).
- Resmana, P. F., & Fauziah. (2023). Kewenangan kepala desa dalam mengelola aset desa berupa tanah kas desa di Grati Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 2(5), 398–405. <http://proceeding.unmuhsumberuko.ac.id/index.php/nsm>
- Save the Children. (2008). *Child participation: A guide for beginners*.
- Shafa, A. N. N., Agus, S. N., & Budi, S. (2024). Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa oleh pemerintah desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, 1(September), 151–164.
- Sihaloho, W., et al. (2023). Pendidikan dan perubahan sosial. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 829–841. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4270>
- Supriyanto, S., Fitri, I., & Nurhayati, N. (2022). Aplikasi inventory peralatan mekanik Unit BRT UNAS berbasis web menggunakan metode Black-Box dan White-Box testing.
- Times. (2023). Dari Kemadang ke Timbanuh tegakkan kesetaraan cegah kekerasan seksual. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/darikemadang-ke-timbanuh-tegakkan-kesetaraan-cegah-kekerasan-seksual>
- UGM. (2017). Pendampingan pengembangan desa percontohan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Desa Kemadang. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. <https://psw.ugm.ac.id/2017/05/24/pendampingan-desa-percontohan-perlidungn-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm-di-desa-kemadang/>
- UNICEF Indonesia. (2017). *Child friendly cities and communities*.
- Vivilia, M. A., & Nuragifah. (2025). Analisis kepastian hukum atas status kepemilikan tanah kas desa sebagai aset pemerintahan desa. *Jurnal Rio Law*, 1(2), 131–146.
- Website Kemadang. (n.d.). KEMADANG (SIDA) – Serah terima jabatan kepengurusan BUMKAL Bahari Sejahtera. Diakses dari <https://www.kemadang-tanjungsari.desa.id/first/index/35>